Juli 2019
Nomor 3

Kertas Kerja Akuntabilitas

Membangun Gerakan Untuk Akuntabilitas: Belajar dari Pengorganisasian Perempuan Indonesia

Nani Zulminarni
Valerie Miller
Alexa Bradley
Angela Bailey
Jonathan Fox

JASS Just Associates
pekka
Accountability Research Center

Tentang Accountability Research Center (ARC)

Accountability Research Center (ARC) adalah sebuah inkubator penelitian terapan yang berbasis di School of International Service, American University. ARC bekerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan pembaharu kebijakan di dunia bagian selatan (negara berkembang) untuk mengembangkan penelitian dan praktik dalam hal transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
Lebih jauh tentang ARC, kunjungi website: www.accountabilityresearch.org.

Tentang PEKKA

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA, Women-Headed Family Empowerment) adalah sebuah organisasi asal Indonesia yang bekerja di akar rumput yang menjalankan visi pemberdayaan dan partisipasi perempuan untuk perubahan sosial. Sejak tahun 2001, PEKKA telah menyoal masalah eksklusi sosial yang telah mengakar di masyarakat melalui pendidikan populer dan pengembangan kepemimpinan yang intensif, yang memungkinkan ribuan perempuan marjinal untuk melawan stigma dan terlibat dalam kehidupan politik serta aksi bersama yang berkelanjutan di ruang publik.
Informasi lebih lanjut tentang PEKKA, kunjungi website: www.pekka.or.id.

Tentang JASS

JASS (Just Associates) adalah sebuah jaringan aktivis internasional, penggiat pendidikan populer dan akademisi di 26 negara yang bekerja untuk mempererat dan memperkuat pendapat, pandangan dan kekuatan bersama perempuan untuk keadilan dan dunia berkelanjutan bagi semua. Berbasis di negara berkembang, JASS membekali dan mendampingi organisasi dan aktivis perempuan akar rumput dengan perangkat, jaringan dan sumberdaya yang mereka butuhkan untuk mengajukan tuntutan dan solusi atas masalah-masalah ketidaksetaraan dan kekerasan. Organisasi ini bekerjasama dengan organisasi dan perempuan di garis depan perubahan dan krisis yang terjadi (suku asli, pedesaan, lesbian, gay, biseksual, transjender dan LGBTQ, anak muda dan perempuan miskin) di Mesoamerica, Afrika Selatan dan Asia Tenggara.
Informasi lebih lanjut tentang JASS, kunjungi website: www.justassociates.org.

Tentang Publikasi ARC

Publikasi ARC menjadi sebuah kerangka dasar untuk peneliti dan ahli strategi bidang akuntabilitas untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka kepada pembaca yang beragam dan mitra potensial lintas isu dan sektor. Sejumlah publikasi tersebut membentuk inisiatif lokal dan national yang berbeda dan terlibat dalam debat yang lebih luas dalam hal transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (TPA). Penerbitan penelitian tersebut termasuk *Accountability Notes*, *Accountability Working Paper* dan *Learning Exchange Reports*.

Hak dan Izin

Material dalam publikasi ini merupakan hak di bawah the Creative Commons Attribution 4.0 Unported license (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Berdasarkan lisensi dari the *Creative Commons Attribution*, anda bebas untuk menyalin, mendistribusikan, menyebarkan dan menyadur kertas kerja ini, termasuk untuk tujuan komersial, didasarkan pada kondisi berikut ini:

Attribusi – Silakan untuk mengutip kertas kerja ini sebagai berikut: Zulminarni, Nani, Valerie Miller, Alexa Bradley, Angela Bailey and Jonathan Fox. 2019. "Membangun Gerakan untuk Akuntabilitas: Belajar dari Pengorganisasian Perempuan Indonesia." Accountability Research Center, *Accountability Working Paper* 3.

Terjemahan – Jika anda menterjemahkan Kertas Kerja ini, harap sertakan disklaimer dengan atribusi sebagai berikut: Terjemahan ini tidak dibuat oleh The Accountability Research Center (ARC) dan tidak seharusnya dianggap sebagai terjemahan resmi ARC. ARC tidak bertanggung jawab terhadap semua isi atau kesalahan dalam terjemahan. Para penulis berterima kasih kepada Kidam Nugraha Tirta yang menterjemahkan laporan ini dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. Versi Bahasa Inggris Kertas Kerja ini dapat dilihat di link berikut: https://accountabilityresearch.org/publications/.

Penghargaan

Terima kasih banyak untuk komentar yang mendalam pada versi sebelumnya dari Karen Brock, Scott Guggenheim dan Cate Sumner.

Dukungan untuk ARC datang dari Ford Foundation, the William and Flora Hewlett Foundation, the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation dan Open Society Foundations.

Peringatan

Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang disampaikan adalah milik para penulis.

Foto Sampul: Parade dari Serikat PEKKA di Jawa Tengah tahun 2011, berbicara tentang eksistensi dan peran strategis perempuan kepala keluarga yang berkontribusi dalam menciptakan keadilan dan masyarakat yang setara. Kredit: PEKKA.

Daftar isi

Tentang Kertas Kerja 5

Tentang Para Penulis 5

Penghargaan 5

Ringkasan 6

I. Pendahuluan 8

II. Kehadiran PEKKA dalam Konteks Sosial 10

III. Membangun Kekuatan Warga Penyeimbang untuk Perubahan Sosial dan Akuntabilitas Publik 13

IV. Kekuasaan dan Pendekatan Membangun Gerakan Feminis 14

V. Mengorganisir Koperasi Mandiri sebagai Basis Pemberdayaan dan Keterampilan Baru 16

VI. Pengembangan Kepemimpinan Perempuan Melalui Aksi dan Pelatihan Berkelanjutan 21

VII. Kemitraan Penelitian Partisipatif Mendorong Data Resmi untuk Pengakuan Perempuan Kepala Keluarga 29

VIII. Mempertahankan Hak-Hak Perempuan melalui Pembedayaan Hukum 31

IX. Komunikasi untuk Pemberdayaan dan Pendidikan 33

X. Pembelajaran Strategis untuk Membangun Gerakan Perempuan 34

XI. Kesimpulan 37

Daftar Pustaka 38

Catatan Akhir 40

Lampiran 1: Memahami Dinamika Kekuasaan Sehingga Kita Bisa Melawan dan Mengubahnya 42

Lampiran 2: Kerangka Kerja PEKKA 43

Tentang Kertas Kerja

Kertas Kerja ini dikembangkan dari sebuah studi kasus yang ditulis pada tahun 2015 oleh Nani Zulminarni dan Valerie Miller untuk sebuah workshop monitoring kebijakan masyarakat dan strategi advokasi (*Zulminarni dan Miller, 2015*). Bertolak dari hal itulah, para peneliti dari Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Just Associates (JASS) dan Accountability Research Center (ARC) melakukan kerjasama untuk memperdalam dan memperbarui isi materi guna berbagi pengalaman PEKKA kepada khalayak yang lebih luas, mulai dari akademisi hingga praktisi bidang akuntabilitas sosial. Dalam melakukannya, mereka melibatkan sejumlah narasumber, termasuk transkrip pembicaraan dengan Nani Zulminarni sebagai penulis utama.

Tentang Para Penulis

Nani Zulminarni adalah Pendiri dan Direktur Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Spesialis pembangunan dan jender asal Indonesia ini memegang gelar master bidang sosiologi, Nani telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai penggiat pendidikan populer, feminis dan aktivis yang bekerja untuk pemberdayaan politik, ekonomi dan sosial perempuan. Saat ini ia juga menduduki jabatan sebagai Presiden the Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE) dan pendiri sekaligus penasehat dari Just Associates Southeast Asia. Informasi lebih jauh tentang Nani, lihat: https://justassociates.org/en/bio/nani-zulminarni.

Valerie Miller telah bekerja di bidang advokasi, pembangunan internasional, jender, dan hak asasi manusia lebih dari 35 tahun. Ia bekerjasama dengan organisasi akar rumput, gerakan sosial, organisasi non-pemerintah (NGO) dan agensi internasional sebagai organisator, advokat, penggiat pendidikan populer, evaluator dan peneliti. Lebih jauh tentang Valerie, lihat: https://justassociates.org/en/bio/valerie-miller.

Alexa Bradley telah bekerja sebagai organisator, fasilitator, ahli strategi organisasi dan penggiat pendidikan populer lebih dari 25 tahun, khususnya fokus dalam mengaitkan pengorganisasian masyarakat dengan strategi-strategi gerakan sosial yang lebih luas. Sebagai Knowledge Development Coordinator di JASS, ia membantu organisasi dalam menerima dan mendalami pelajaran dari kerja internal organisasi dan berbagi pandangan-pandangan dari praktik yang dilakukannya khalayak aktivis global yang lebih luas. Lebih lanjut tentang Alexa, lihat: https://justassociates.org/en/bio/alexa-bradley.

Angela Bailey bergabung di ARC pada Agustus 2016 setelah satu dekade sebelumnya bekerja dalam perancangan dan pelaksanaan program pada sejumlah NGO internasional. Sebelumnya, Angela adalah Direktur pada sebuah program akuntabilitas bidang kesehatan di Uganda. Ia menyelesaikan program master di Columbia University School of International and Public Affairs (SIPA).

Jonathan Fox adalah seorang profesor pada the School of International Service di American University dan Direktur dari ARC. Beberapa buku karyanya termasuk Accountability Politics: Power and Voice in Rural Mexico (Oxford 2007) dan Mexico's Right-to-Know Reforms: Civil Society Perspectives (co-editor, Fundar/Wilson Center 2007). Ia berkolaborasi dengan sejumlah kelompok kepentingan publik berskala luas, organisasi-organisasi internasional dan pengambil kebijakan, serta saat ini menjadi anggota boards of directors of Fundar (Mexico) dan the Bank Information Center (Washington DC). Beberapa publikasi online nya bisa ditemukan di http://jonathan-fox.org/.

Ringkasan
Membangun Gerakan Untuk Akuntabilitas: Belajar dari Pengorganisasian Perempuan Indonesia

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah organisasi asal Indonesia yang bekerja di akar rumput yang menjalankan visi pemberdayaan dan partisipasi perempuan untuk perubahan sosial. Sejak tahun 2001, PEKKA telah menyoal eksklusi sosial yang mengakar di masyarakat melalui pendidikan populer, pengembangan kepemimpinan yang intensif dan akuntabilitas sosial serta advokasi kebijakan. Ribuan perempuan marjinal telah melawan stigma dan terlibat dalam ruang publik dengan ikut serta dalam kehidupan politik dan aksi bersama yang berkelanjutan. Penekanan pada suara akar rumput yang mandiri ini mulai diwujudkan dengan pembentukan 2.559 koperasi tingkat desa dan seterusnya meningkat hingga ke tingkat kabupaten, provinsi dan nasional (*PEKKA, 2017*).

Kombinasi kegiatan advokasi nasional PEKKA dengan pengorganisasian akar rumput dan kekuatan penyeimbang telah mempengaruhi program sosial tingkat nasional dan memperluas akses perempuan terhadap sistem hukum. Meningkatnya akses terhadap sejumlah lembaga pengadilan memungkinan perempuan untuk memperoleh dokumen hukum dari status kewarganegaraan mereka. Hal ini menjadikan perempuan dapat meresmikan sebuah pernikahan yang diselenggarakan berdasarkan hukum Islam dan mencatatkan kasus perceraian yang memungkinkan mereka untuk diakui sebagai kepala keluarga. Pengalaman dalam memperoleh dokumen hukum dapat membangun pengetahuan dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk mendapatkan akte kelahiran untuk anak-anak mereka, sehingga menjamin kesempatan dan akses terhadap layanan-layanan sosial, termasuk pendidikan, bagi generasi berikutnya.

PEKKA terlibat dalam membangun kemitraan lintas sektor dengan pemerintah lokal, otoritas keagamaan, pengambil kebijakan nasional dan lembaga pembangunan internasional. Hal ini menciptakan kesempatan dan legitimasi secara politik yang dibutuhkan untuk mengarahkan budaya yang kompleks dan dinamika politik serta melawan kekuatan yang menentang akuntabilitas dan pelibatan sosial.

Anggota komunitas PEKKA mengangkat isu tentang akuntabilitas sosial, akses pemantauan terhadap layanan-layanan sosial dan penyelesaian berbagai masalah melalui kerjasama dengan para pemegang otoritas-*meskipun tidak menggunakan istilah tersebut*. Apa yang membuat pendekatan yang dilakukan PEKKA terhadap akuntabilitas sosial menjadi pembeda adalah penekanan mereka dalam membangun dasar sebuah basis sosial yang luas dan mandiri untuk mengangkat pendapat perempuan akar rumput, dikombinasikan dengan pendekatan berbagai level dalam advokasi. PEKKA begitu mempertimbangkan hal ini dengan melibatkan para pemegang otoritas mulai dari tingkat desa, nasional dan internasional.

Upaya panjang PEKKA untuk membangun sebuah basis organisasi yang luas dengan lebih dari 31.447 anggota telah memunculkan konsep ulang dan baru dari bahasa, analisis dan ide-ide strategis dalam hal transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (TPA).

Pelajaran utama dari strategi-strategi akuntabilitas dari PEKKA, adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan dasar kelembagaan dan sebab budaya dari eksklusi sosial untuk menciptakan ruang dan kepercayaan diri yang dibutuhkan bagi perempuan guna menyuarakan pendapat mereka dan melakukan aksi bersama.

2. Memanfaatkan pemberdayaan ekonomi untuk membangun fondasi sosial guna mewujudkan suara yang mandiri dan keterlibatan dalam kewarganegaraan.
3. Membangun kekuatan penyeimbang melalui aksi strategis dalam meningkatkan suara anggota, keterampilan kepemimpinan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam seluruh aspek kegiatan.
4. Menghadirkan sejumlah bukti kepada khalayak yang lebih luas guna memajukan strategi-strategi advokasi dan dampak maksimalnya.
5. Membina aliansi dan hubungan di luar maupun di dalam pemerintahan pada berbagai level untuk memperluas dampak dan perlawanan terhadap penentangnya.

Forum Nasional PEKKA. Sumber: PEKKA

I. Pendahuluan

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah organisasi dari Indonesia yang menggunakan strategi-strategi pengembangan gerakan untuk membangun kekuatan dan pendapat mereka melalui partisipasi dalam kehidupan dan masyarakat sekitar mereka. PEKKA bekerja di akar rumput dengan visi kekuatan bersama perempuan dan partisipasi dalam perubahan sosial. PEKKA menumbuhkan peran kritis, aktif dari anggota yang terorganisasi sebagai penggiat advokasi bagi pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Ini lebih dari sekadar mengorganisasi perempuan marjinal sebagai *"pengguna dan pemilih"* dari layanan (*Cornwall and Gaventa, 2001*), namun mendorong pelibatan perempuan sebagai pemimpin sehingga mereka mampu mempengaruhi keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang langsung berdampak pada kehidupan mereka. Beragam segi dan pendekatan jangka panjang PEKKA berfokus pada pengkonsolidasian sebuah basis sosial yang luas melalui koperasi, melahirkan pemimpin akar rumput yang intensif dan membangun aliansi berbagai sektor untuk mendorong pemerintah yang responsif di berbagai level.

Seperti disampaikan pada analisis kekuatan feminis, pendekatan membangun gerakan PEKKA membawa pandangan yang berharga bagi bidang TPA tingkat global, di mana lembaga-lembaga internasional sering kali berfokus pada intervensi proyek terbatas dan berpijak pada aktivitas yang "light touch". Hal ini berbeda dengan gerakan jangka panjang yang dipimpin oleh masyarakat dan berbasis sosial untuk pemerintahan yang akuntabel yang direspresentasikan di dalam agenda global TPA dan praktik dalam masyarakat. Berbagai strategi dari PEKKA memasukkan akuntabilitas sosial ke dalam agenda untuk perubahan yang integratif- *meskipun tidak menyebut dengan istilah tersebut*. Seperti halnya dengan sejumlah organisasi yang menyokong akuntabilitas sosial, PEKKA menekankan pada pelibatan kerjasama dengan pemerintah untuk memantau layanan publik dan akses terhadap sistem hukum. Namun demikian, Pendekatan PEKKA dalam akuntabilitas sosial berkembang di luar upaya penyelesaikan masalah yang bersifat lokal dengan membangun sebuah basis sosial yang luas sebagai dasar bagi suara perempuan dan juga advokasi kebijakan yang berkelanjutan pada tingkat nasional, guna mendorong reformasi kelembagaan yang dibutuhkan untuk menunjukkan penyebab utama dari eksklusi sosial.

Serikat PEKKA di Brebes, Jawa Tengah, Indonesia, mengadakan pawai untuk memperkenalkan program dan kegiatan PEKKA di desa.
Sumber: PEKKA

Belajar dari pengalaman PEKKA selama 17 tahun dalam membangun organisasi basis yang luas (saat ini beranggotakan 31.447 orang) yang menawarkan ide strategis, analisis dan konsep ulang yang baru. PEKKA menggugat masalah eksklusi sosial yang mengakar di masyarakat melalui pendidikan populer dan pengembangan kepempinan yang intensif, yang memungkinkan bagi ribuan perempuan marjinal untuk melawan stigma dan melibatkan diri pada kehidupan politik dan aksi bersama yang berkelanjutan di ruang publik.[1] Penekanan dalam hal ini adalah pada suara akar rumput yang mandiri di 2.559 koperasi tingkat desa dan telah ditingkatkan hingga tingkat kabupaten, provinsi dan nasional (*PEKKA, 2017*). Dengan mengedepankan nuansa budaya, PEKKA menggandeng pemerintah lokal dan otoritas agama Islam untuk menciptakan ruang politik yang dibutuhkan untuk berjuang bersama menghadapi para penentang akuntabilitas publik dan inklusi sosial perempuan. Keberhasilan berlapis dari PEKKA- perubahan dalam praktik dan agenda kebijakan dalam lingkup berbeda dari pemerintah lokal hingga nasional- memastikan kombinasi yang efektif dari strategi perubahan yang saling menguatkan. Termasuk dalam hal ini adalah pengorganisasian masyarakat basis, pelatihan intensif kepemimpinan, media komunitas, membangun aliansi dan didukung oleh penelitian partisipatif dan advokasi berbasis bukti yang didasarkan pada kekuatan analisis.

PEKKA juga telah menyusun prioritas strategi pemberdayaan hukum, ikut serta dalam gerakan global yang menjalankan komunitas paralegal untuk memperluas akses terhadap keadilan.[2] Beberapa keberhasilan PEKKA dalam isu perempuan dan anak adalah termasuk memperluas akses terhadap sistem pengadilan Indonesia yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan dokumen hukum yang sangat penting seperti pernikahan, perceraian dan akte kelahiran. Didasarkan pada penelitian dan kolaborasi jangka panjang dengan Pengadilan Agama Indonesia, Mahkamah Agung Indonesia dan Family Court Australia, program paralegal PEKKA telah memberikan bantuan dan informasi hukum kepada 125.000 orang di 20 provinsi sejak tahun 2010 dan juga mendukung efektifitas pelaksanaan dari sistem sidang keliling yang berskala luas dan terintegrasi dari pemerintah (*Sumner dan Nani Zulminarni, 2017, 2018*). Kegiatan ini telah membantu untuk mempercepat status hukum dan hak untuk mengidentifikasi keluarga perempuan kepala keluarga, meningkatkan akses terhadap sistem pengadilan keluarga sekaligus program anti kemiskinan dari pemerintah. PEKKA juga memberikan perempuan kesempatan dan keterampilan untuk memperoleh kedudukan sosial dan berpartisipasi dalam penganggaran dan perencanaan pengembangan masyarakat—sebuah cara kritis untuk mendorong pemerintah lokal agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan marjinal dan keluarganya.[3]

Sebagian besar perkembangan kegiatan PEKKA yang diluncurkan pada tahun 2015, termasuk pengembangan sebuah pusat pelatihan kepemimpinan yang disebut dengan Akademi Paradigta. Program intensif selama 12 bulan ini telah melatih lebih dari 2.500 perempuan, meningkatkan pengembangan kepemimpinan ke skala yang lebih tinggi.

Keterangan Gambar 1. Kehadiran PEKKA di seluruh Indonesia

PEKKA saat ini aktif di wilayah yang digambarkan berwarna ungu pada peta Indonesia berikut ini.

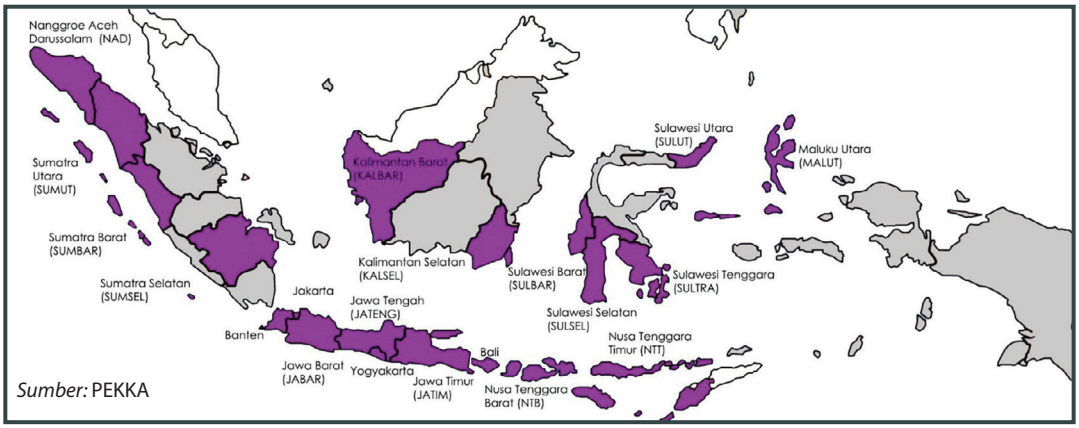

Sumber: PEKKA

II. Kehadiran PEKKA dalam Konteks Sosial

1. Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia

Kegiatan PEKKA dimulai pada tahun 2001, sebagai proyek Komisi Nasional Perempuan (*Proyek Janda*), yang dimaksudkan untuk melakukan pendokumentasian kehidupan janda di wilayah konflik di Aceh. Dalam proyek janda ini, pendiri PEKKA Nani Zulminarni memandang suatu potensi yang lebih dan menyusun kembali proyek tersebut menjadi sebuah strategi komprehensif dan berkelanjutan untuk perubahan. Lebih penting lagi, Nani mengubah nama proyek menjadi PEKKA; yang berarti Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, kata yang juga merupakan singkatan dari "perempuan kepala keluarga". Sejak undang-undang perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa kepala keluarga adalah laki-laki dan tidak mengenal perempuan dalam kapasitas ini, penamaan organisasi ini mengirim sebuah pesan politik.

Tahun 2010, Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia memperkirakan bahwa dari 65 juta rumah tangga di Indonesia, 14 persen di antaranya dikepalai oleh perempuan (*Sumner 2010; 2011*). Definisi kepala keluarga yang digunakan oleh BPS secara potensial memungkinan dua orang yang berbeda dapat untuk dipertimbangkan sebagai seorang kepala keluarga: (i) seseorang yang yang sebenarnya bertanggungjawab memenuhi kebutuhan sehari-hari dari rumah tangga atau (ii) seseorang yang bisa dipertimbangkan menjadi kepala keluarga. Definisi tersebut membingungkan, mengingat hanya satu nama yang bisa dicatatkan sebagai kepala keluarga melalui proses survey nasional BPS. Oleh karenanya, kemungkinan bahwa terdapat kesalahan dalam melakukan estimasi jumlah perempuan kepala keluarga di Indonesia. Hal ini berimplikasi pada perencanaan dan implementasi kebijakan yang mendukung program pengurangan kemiskinan di Indonesia yang semestinya menargetkan perempuan kepala keluarga dan keluarga mereka.

Perempuan yang memimpin rumah tangga, secara umum didasarkan pada bahasa istilah *janda*- sebuah istilah meremehkan dan negatif merujuk perempuan janda, ditelantarkan atau bercerai. Di Indonesia, kekuasaan sistem keyakinan, hukum, pejalaran agama dan hirarki dan kelas sosial mengarah kepada stigmatisasi dan eksklusi sosial dari janda. Kebanyakan perempuan tanpa suami yang dianggap sebagai sesuatu yang aib atau melanggar norma keluarga yang berlaku- khususnya bagi para perempuan yang bercerai atau memiliki anak di luar pernikahan, tidak pernah menikah, ditelantarkan atau menderita kekerasan. Mereka jarang diundang dalam kegiatan sosial, membiarkannya sendirian untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di tengah masyarakat. Dalam upaya untuk mendukung diri mereka sendiri dan anak-anaknya, mereka bekerja mulai pagi hingga malam, yang membuat mereka sulit untuk berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan sosial atau kehidupan sosial, di mana informasi utama disebarluaskan dan membangun satu tempat di tengah masyarakat. Akibatnya, sejumlah perempuan kehilangan akses untuk mengembangkan ide dan sumberdaya. Laki-laki dengan mudah menghakimi mereka sebagai "gampangan", perempuan kesepian, sementara perempuan yang lain mencurigai mereka berpotensi akan mengganggu suami-suami mereka. Mereka harus menjaga perilaku mereka dengan sangat hati-hati, yang akan memperburuk rasa kesepian dan keterasingan mereka. Sebagian besar dari mereka tidak mengakui hal ini, karena mereka diminta untuk menyangkal atau menyembunyikan perasaan mereka. Untuk Nani Zulminarni, menjadi lebih jelas bahwa status perkawinan dan juga golongan memainkan sebuah bagian penting dalam beban yang ditanggung oleh perempuan miskin Indonesia. Menyebut mereka sebagai perempuan kepala keluarga yang disingkat dengan pekka adalah sebuah cara para perempuan tersebut untuk mengklaim sebuah identitas kelompok baru sebagai tanggungjawab dan kontribusi sebagai anggota masayarakat, menolak status rendahan yang diberikan kepada mereka dengan label *janda*.

Pola-pola budaya dari eksklusi sosial diperkuat oleh bagaimana sistem hukum dan lembaga pemerintah memperlakukan perempuan tanpa suami (dan anak-anak mereka), yang seringkali mensyaratkan mereka

Forum Wilayah Serikat Pekka di Kalimantan Barat tahun 2004, anggota Serikat Pekka bertemu untuk memperkuat gerakan perempuan kepala keluarga. Sumber: PEKKA

untuk memiliki surat nikah. Survey terhadap anggota PEKKA telah menunjukkan bahwa kurang dari setengahnya berada dalam status pernikahan yang legal (*Sumner, 2011*). Anak dari orangtua yang tidak memiliki pernikahan tercatat menghadapi kesulitan untuk memperoleh akta kelahiran, yang nama dari ayah dan ibunya harus dituliskan pada akta tersebut (*Sumner dan Zulminarni, 2018*) dan ketiadaan akte kelahiran ini pada gilirannya membatasi akses terhadap pendidikan formal dan identitas sebagai warganegara. Perempuan kepala keluarga juga memiliki masalah dalam mengakses bantuan pemerintah seperti skema bantuan uang tunai, subsidi beras dan program pengobatan kesehatan gratis. (*Sumner 2011*).[4]

2. Teori Perubahan PEKKA

Sejak memulai kegiatannnya di Aceh, Pekka telah mengorganisasi lebih dari 31.400 anggota perempuan janda, bercerai, sendiri, terlantar ke dalam lebih dari 2.559 koperasi simpan pinjam berbasis masyarakat desa di 20 dari 34 provinsi di Indonesia. (*lihat boks 1*) dan juga 56.325 penerima manfaat (*PEKKA 2017*).[5] Mengingat para pegiat PEKKA adalah feminis yang bekerja dalam sebuah konteks masyarakat Islam yang besar, strategi perubahan bergantung pada norma-norma sosial yang konservatif-yang pada saat yang sama juga melakukan renegosiasi dengan mereka.

Berawal dari langkah pertama dalam membentuk sejumlah koperasi di tingkat desa, PEKKA memilih untuk berhati-hati dalam membangun kepemimpinan, kapasitas dan kepercayaan diri para perempuan. Untuk melawan efek antigerakan dari kekuatan tak terlihat dari budaya, norma sosial, bias dan keyakinan keagamaan yang dominan, para penggiat PEKKA menggunakan pendidikan feminis populer yang pastisipatif untuk memunculkan kepedulian kritis perempuan, menyingkirkan "kewajaran" dari eksklusi sosial dan stigmatisasi terhadap mereka sebagai landasan untuk membangun sebuah gerakan. PEKKA membentuk ruang pembelajaran dan komunitas yang aman dan kreatif sebagai bagian dari proses pengembangan koperasi, bekerjasama dengan sesama perempuan untuk berbagi cerita dan mimpi, menemukan kesamaan perjuangan dengan perempuan lainnya, menggali pertanyaan kritis dan dinamika kekuasaan dan-lebih dari itu-mengambil langkah aksi mereka sendiri. Pendidikan feminis populer membangun kekuatan-baik personal dan bersama- dari dalam ke luar, yang pada saat yang sama membangun pengalaman dan kemampuan praktis mereka (*lihat Lampiran 1*).

Boks 1. PEKKA dalam Angka

Tahun dimulai: 2001
Pembentukan Koperasi: 2,559[b]
Anggota Koperasi Perempuan: 31,447[b]
Jumlah Paralegal yang dilatih: 2,700[a]
Jumlah Paralegal yang Aktif: 1,350[a]
Jumlah Kasus yang ditangani paralegal: 125,000[a]
Provinsi yang Aktif: 20[b]

Sumber:
[a] Sumner and Zulminarni 2017
[b] PEKKA 2017

Laporan restropektif 10 tahun PEKKA menggarisbawahi bahwa masalah dan isu yang dihadapi perempuan kepala keluarga pada dasarnya melawan dinamika kekuasaan yang mendominasi kehidupan mereka dalam tiga dimensi berbeda: kekuasaan formal, informal dan tak terlihat, termasuk sistem keyakinan (kekuasaan tak terlihat). Pemberdayaan perempuan kepala keluarga dimaksudkan untuk memperluas kapasitas individual dan kelompok mereka guna mempengaruhi dimensi-dimensi tersebut dan juga memberikan kemampuan atas keadaan ekonomi, kesetaraan dan keadilan (*PEKKA, 2017*). Kegiatan yang dilakukan tersebut tumbuh dari teori perubahan seperti yang digambarkan pada gambar 2. *Kerangka lebih detil dari PEKKA dapat ditemukan di Lampiran 2*.

Gambar 2. Teori Perubahan PEKKA

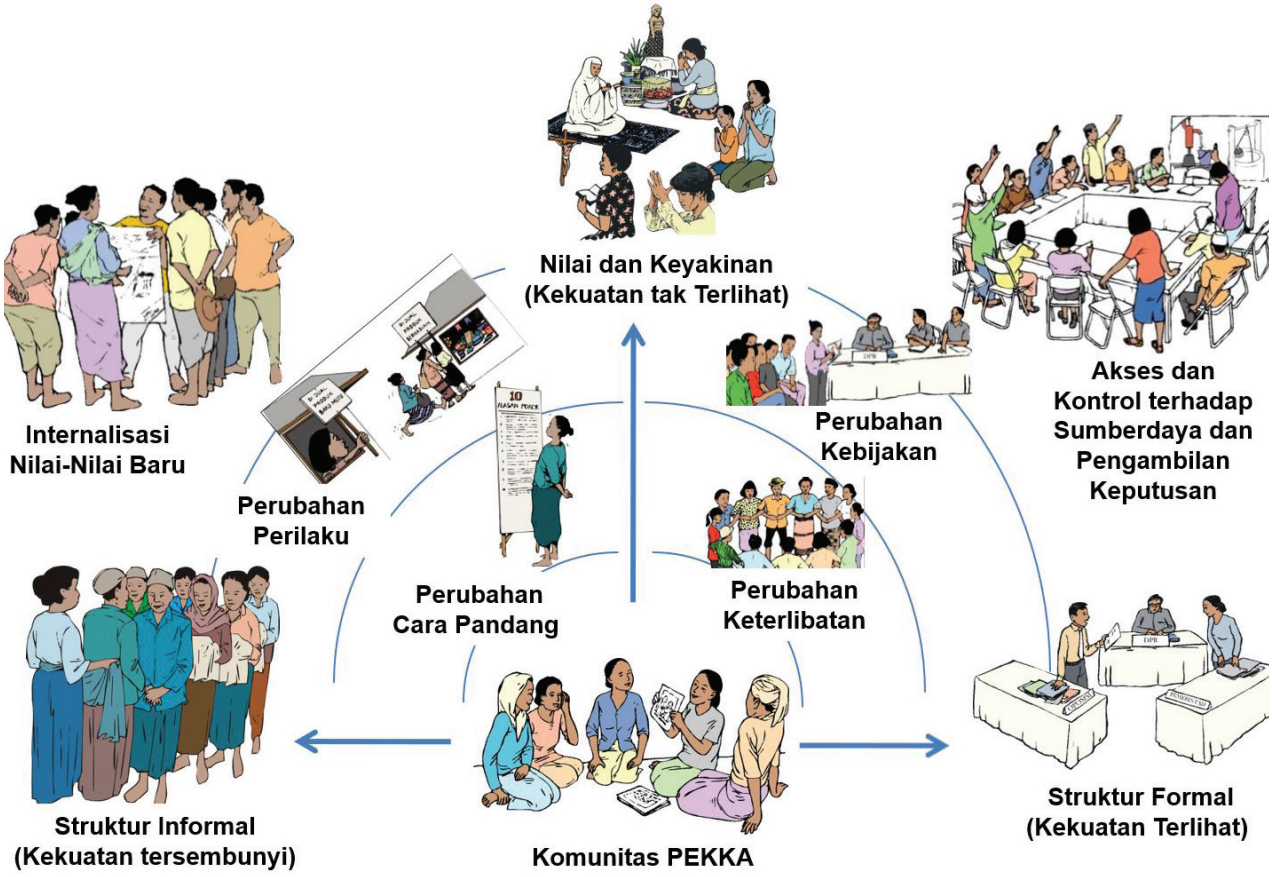

Sumber: PEKKA 2012

III. Membangun Kekuatan Warga Penyeimbang untuk Perubahan Sosial dan Akuntabilitas Publik

Sejak awal, pendekatan PEKKA pada perubahan sosial dan pemberdayaan perempuan dipusatkan pada pembentukan koperasi simpan pinjam dan tabungan mikro. Dimulai dengan kebutuhan perempuan untuk bertahan dari tekanan ekonomi, PEKKA membantu memberikan sebuah kritik dasar dari kestabilan ekonomi dan keterkaitan masyarakat, yang vital untuk pengorganisasian. Perempuan anggota koperasi mengumpulkan sejumlah uang yang tumbuh seiring waktu dan dari dana itulah mereka dapat meminjamnya untuk keperluan yang telah disepakati. PEKKA juga memiliki dana bergulir yang disediakan pada saat simpanan koperasi mencapai jumlah tertentu. Secara simultan, kegiatan PEKKA untuk mengkatalisasi dan memperkuat keterampilan anggota koperasi simpan pinjam dalam kepemimpinan, berpikir kritis, kemampuan organisasi dan partisipasi politik. Koperasi tersebut membantu mengembangkan budaya dan praktik dari pengembangan masyarakat (solidaritas), pengambilan keputusan yang demokratis dan partisipasi dalam masalah hukum, membantu perempuan untuk menjadi pemimpin yang percaya diri dan terlibat bersama pemegang otoritas untuk mengadvokasi perubahan. Penelitian partisipatif, program pelatihan kepemimpinan dan program paralegal memberikan kontribusi bagi pemberdayaan kewarganegaraan dan strategi advokasi yang cerdas didasarkan pada keberpihakan terhadap perempuan.

Meskipun terdapat hambatan dan kemunduran, visi kami terbukti hari ini—memperkuat kesempatan ekonomi dan solidaritas perempuan adalah sebuah jalan untuk meningkatkan kehidupan mereka dan kapasitas untuk melakukan tindakan, sebuah cara untuk meningkatkan partisipasi politik mereka pada masyarakat , sebagai warga yang semangat, peduli, cerdas dan memiliki sensitifitas tinggi, berkemampuan untuk mengarahkan likaliku kekuasaan yang membentuk keadaan mereka. Sejak awal, kita telah memutuskan pilihan strategis untuk menggunakan pemberdayaan ekonomi sebagai pintu masuk dan yakin sepenuhnya hal ini akan mengarah kepada kehidupan perempuan dan keluarganya yang lebih baik.

Zulminarni (2014)

IV. Kekuasaan dan Pendekatan Membangun Gerakan Feminis

Satu dari sekian elemen penting dari pendekatan PEKKA adalah kerangka analisis kekuasaan (*lihat Lampiran 1*), yang menopang strategi dan pengorganisasian gerakan dan kerja-kerja advokasi. Sebuah pendekatan yang berbasis pemahaman atas kekuasaan dan bagaimana mengembangkannya secara efektif oleh perempuan marjinal.[6]

1. Membangun Kekuatan Penyeimbang

Pendekatan membangun gerakan feminis memberikan pencerahan pada satu dari pandangan penting yang muncul dari penelitian terkini TPA: kebutuhan untuk membangun kekuatan penyeimbang guna mendorong dan mempertahankan pemerintahan yang responsif dan melawan kekuatan anti akuntabilitas.[7] Pengembangan kekuatan PEKKA berasal dari jaringan koperasi yang terorganisir dengan baik dan legitimasi serta kredibilitas yang dibangun melalui kerjasama masyarakat dan aliansi strategis dengan aparatur pemerintah pada setiap level pemerintahan.

Kerja-kerja PEKKA dengan perempuan marjinal dibentuk oleh pemahaman yang mendalam tentang berbagai cara kekuasaan berpengaruh untuk membungkam dan mengucilkan perempuan. Untuk menciptakan dan mempertahankan kekuatan penyeimbang bagi akuntabilitas jangka panjang, aksi bersama yang luas dibutuhkan baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Banyak strategi dan intervensi pembangunan manakala mempertimbangkan kekuasaan, umumnya fokus pada bentuk-bentuk formal atau yang lebih banyak terlihat - hukum, kebijakan, pengadilan, akses terhadap pinjaman dan proses pemilihan. Namun para pelaku yang handal seringkali bermain di belakang layar menggunakan "kekuasaan tak terlihat dan tersembunyi" untuk mempengaruhi politik dan suara oposisi yang diam seperti, perempuan, kelompok lokal dan masyarakat miskin. Ideologi, norma sosial dan sistem keyakinan berperan sebagai sebuah "kekuatan tak terlihat", membentuk pola pikir sebagai cara untuk meminggirkan dan mengkambinghitamkan seseorang dengan basis identitas, gender, status, ras dan etnis. Kekuatan dari perilaku budaya-baik pasif maupun melalui manipulasi aktif- kerap melemahkan masyarakat dari upaya mengadvokasi mereka sendiri, sehingga mereka menerima atau menarik diri terhadap ketidakadilan yang mereka terima dalam kehidupannya. Kekuatan tak terlihat juga merusak hukum dan kebijakan publik ketika menghadapi *status quo*. Analisis PEKKA tentang kekuatan dari dimensi-dimensi multilevel tersebut menerangkan strategi jangka panjang dan berlapis untuk membangun dan mempertahankan kekuataan penyeimbang (*VeneKlasen dan Miller, 2002*).

Strategi membangun gerakan PEKKA dirancang untuk menyoal dinamika kekuatan beragam tersebut dengan mengembangkan jaringan aktif dan terorganisir dari aliansi dan pemimpin perempuan yang berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang. Dalam prosesnya, PEKKA telah menyusun strategi kreatif dan cermat yang memungkinkan anggotanya untuk mengarahkan dan mendorong kekuataan pada berbagai level-dari desa hingga jajaran kementerian nasional. Strategi-strategi tersebut mencakup hal di bawah ini:

- Membangun kemandirian ekonomi para anggotanya, memberikan sebuah pijakan kepercayaan dan rasa aman yang mendorong inklusi sosial dan partisipasi warga.
- Mengembangkan kapasitas organisasi dari para anggota - termasuk kemampuan penelitian, analisa dan kepemimpinan - sebagai sebuah suara kolektif yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan mereka.
- Memastikan terciptanya rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota, menekankan saling peduli dan komitmen berbagi visi untuk peningkatan kehidupan mereka.
- Menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian untuk mendokumentasikan dan memperoleh pengakuan atas perempuan kepala keluarga dalam data statistik – menjadi dasar penting untuk memperluas akses terhadap layanan.

- Memperoleh legitimasi dan kekuatan melalui jalinan aliansi strategis di dalam dan di luar pemerintahan serta di dalam sistem pengadilan Indonesia, yang memungkinkan lembaga untuk meningkatkan kemampuan memberikan solusi terhadap kebijakan sistem pengadilan formal dan rekomendasi anggaran yang membantu para anggotanya.
- Menentang narasi sosial dan keagamaan yang merendahkan perempuan dengan mendorong kepedulian kritis dan menggandeng mitra utama (*lihat Boks 2*) dan membangun komunikasi dengan pesan-pesan alternatif.

2. Reaksi

Seperti yang telah diduga, kesuksesan PEKKA telah memancing reaksi dan resistensi dari pelaku kepentingan yang kuat seperti, rentenir, fundamentalis agama dan para pelaku di masyarakat sipil dan pemerintah yang memandang kerja-kerja PEKKA sebagai ancaman. Beberapa di antaranya mencoba untuk mendiskreditkan PEKKA dan anggotanya, menyebutnya sebagai pembuat masalah, pelacur atau bahkan teroris dan menebarkan isu bahwa kerja-kerja tersebut bersifat kepentingan pribadi, mencemarkan agama atau memandang sebagai persoalan pribadi yang tidak layak dipertimbangkan secara publik. Kemampuan PEKKA untuk melibatkan keanggotaan yang besar dan luas dan menggandeng para pendukung yang mempunyai kekuatan selama bertahun-tahun adalah sangat penting dalam mendorong daya kritis.

Dibanding mengambil risiko untuk berlawanan dengan para penentang secara langsung, PEKKA justru secara nyata membangun hubungan dengan berbagai mitra untuk melindungi dan memperkuat anggota-anggotanya dan mempeluas isu-isu mereka. Dengan menggunakan taktik kombinasi, PEKKA telah mendorong struktur di dalam maupun di sekitar kekuasaan untuk memperoleh pengakuan atas apa yang mereka kerjakan dan membangun aliansi dan pendukung baik itu di dalam mapun di luar pemerintahan. Juga ditumbuhkan kemauan dengan mempererat hubungan dengan aparatur pemerintah dari berbagai level-dari tingkat kepala desa hingga pimpinan kabupaten serta provinsi dan pemimpin di tingkat kementerian. PEKKA juga merekatkan aliansi strategis dengan para NGO, kelompok keagamaan progresif dan lembaga donor internasional, seperti Bank Dunia dan Australian Aid. Aliansi strategis tingkat lokal dan internasional membantu PEKKA dalam upaya-upaya advokasi dan akuntabilitas dan mempertahankan diri dari serangan dan reaksi yang menentangnya.

Boks 2. Menghadapi Kekuatan Bayangan dengan Menciptakan Ruang dalam Islam untuk Mendiskusikan Hak-hak Perempuan

PEKKA bermitra dengan ALIMAT, sebuah jaringan progresif para pemikir Islam perempuan dan laki-laki.[8] PEKKA dan ALIMAT berbagi visi islam yang lebih luas tentang keadilan, mengedukasi pemimpin dan pemegang otoritas lokal dalam perspektif perempuan seperti yang diinterpretasikan dalam Al-Quran. Kedua organisasi ini menyelenggarakan workshop bersama untuk memperkuat pengurus dan anggota berdiskusi dengan para pemimpin lokal agama Islam terkait perspektif yang lebih luas tentang peran perempuan di dalam masyarakat- mulai dari padangan yang paling fundamentalis hingga pemikiran yang paling terbuka. ALIMAT dan PEKKA juga bekerjasama untuk melakukan seminar dengan para aparatur sipil di tingkat desa, kabupaten dan tingkat nasional. Ruang dialog ini sangat penting di Indonesia yang mayoritas Muslim, di mana kelompok agama konservatif menerapkan narasi-narasi yang mendukung dan tumbuh berpengaruh dengan meminjam tradisi budaya untuk menentang independensi perempuan yang dianggap sebagai perlawanan terhadap agama dan masyarakat.

PEKKA mendorong pembelajaran jangka panjang melalui kegiatan fungsi literasi untuk anggotanya. Di sini tampak anggota di Banten yang tengah membaca surat kabar secara bersama-sama.
Sumber: PEKKA 2012

V. Mengorganisir Koperasi Mandiri sebagai Basis Pemberdayaan dan Keterampilan Baru

1. Bagaimana PEKKA Membangun Koperasi

Setelah mempertimbangkan konteks lokal untuk keberlangsungan pembentukan koperasi simpan pinjam, para penggiat PEKKA memperkenalkan progam tersebut kepada pejabat desa untuk memperoleh ijin resmi. Mereka menekankan aspek pengembangan masyarakat dari koperasi, yang memungkinkan penerimaan yang lebih besar dari anggota resmi dan calon anggota, sehingga bisa lebih memastikan keberlangsungan pekerjaan dan keamanan bagi pengurus dan anggota. Dari rumah ke rumah, para penggiat PEKKA kemudian mengenalkan program tersebut ke perempuan desa yang janda, bercerai, ditelantarkan atau masih belum menikah. Dengan membangun ketertarikan dan kepercayaan, mereka mengundang siapa saja yang tertarik untuk berkumpul dan mendiskusikan mimpi-mimpi para perempuan tersebut dan tantangan yang mereka hadapi pada umumnya. Didorong untuk menyelesaikan solusi berbagai masalah yang dihadapi maka diusulkan untuk membentuk kelompok simpan pinjam.

Pengorganisasian membutuhkan waktu

Saya harus pergi dari pintu ke pintu, bertemu secara pribadi, menghubungkan satu perempuan dengan yang lainnya. Dari perempuan yang saya temui, saya harus menemukan seseorang yang bisa dipercaya dan memiliki reputasi yang baik di desanya. Saya akan menawarkan sejumlah ide kepadanya terlebih dahulu. Ketika akan mengadakan pertemuan, saya harus memilih waktu di mana perempuan sedang tidak sibuk, seringkali itu pada malam hari. Kebanyakan perempuan lebih banyak diam dalam pertemuan tersebut-karena malu dan takut. Saya meilihat banyak penderitaan pada perempuan-perempuan tersebut. Ketika kita bertemu para janda kita tahu dari wajah mereka bahwa mereka memikul beban berat: tekanan sosial, trauma, stigma. Masyarakat berkata kepada mereka: "Kamu hanya seorang janda". Janda tidak masalah, seseorang berkata. Mereka tidak pernah diberikan kesempatan untuk berbicara dan berpartisipasi; ini adalah tantangan pertama mereka yang nyata. Sehingga saya banyak menghabiskan waktu untuk membangun kepercayaan diri mereka.

Saya berbicara tentang program dengan para perempuan itu dengan bahasa mereka sehari-hari. Mereka merasa bahwa mereka memiliki banyak teman dan bisa percaya diri ketika bersama. Dari situlah, kita bergerak dan saya menunjukkan detail program kepada mereka. Saya jelaskan kepada mereka bagaimana kita bisa mengatasi masalah yang mereka ceritakan kepada saya. Saya berbagi cerita yang saya dengar dari desa lain yang memiliki masalah yang serupa. Ini adalah bagian penting- untuk menjelaskan apa yang telah perempuan lain lakukan untuk mengubah situasinya. Setelah dua atau tiga bulan, kita membentuk tim yang memiliki visi dan misi. Dengan 10 orang, kita mampu untuk mengubah hidup

Penggiat PEKKA
(Zulminarni and Miller 2015)

Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam PEKKA di Kalimantan Selatan, yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. Sumber: PEKKA

Ketika kelompok Pekka dibentuk, seringkali menghadapi tantangan dari anggota masyarakat, seperti rentenir yang mengambil keuntungan dari meminjamkan uang kepada masyarakat. Kepentingan yang lain pun menolak. Para istri kepala desa yang menjalankan organisasi perempuan yang dikenal dengan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah lama menjadi satu-satunya organisasi yang menggerakkan perempuan dan pembangunan.[9] Mereka merasa terancam dengan keberadaan organisasi baru yang lebih mandiri, khususnya sejak perempuan Pekka dengan cepat mendapatkan pengalaman dalam kehidupan politik dan ekonomi dan memperoleh hasil nyata (*Zulminarni and Miller 2015*).

Dengan bergabung dalam koperasi, memungkinan perempuan miskin untuk memperoleh kekuatan bersama dan penghargaan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi mereka di dalam maupun di luar komunitas mereka. Mendampingi perempuan membentuk koperasi, para pegiat PEKKA memfasilitasi proses panjang pengembangan organisasi dan membangun kelompok, memastikan kemampuan anggotanya dalam melakukan perubahan dalam hidupnya dan memicu semangat kerjasama dan solidaritas. Langkah awal ini penting untuk pengembangan kepemimpinan dan demokrasi. Anggota mengajukan usulana nama koperasi dan memilih pengurus, untuk sebagian banyak perempuan ini adalah pertama kali mereka berpartisipasi dalam mengambil keputusan di publik. Kelompok juga menyusun aturan dasar untuk memperkuat koperasi dan penyelesaian konflik. Koperasi membangun kemandirian dan stabilitas ekonomi dan mendukung potensi ekonomi perempuan untuk bertahan di dalam masyarakat. Koperasi simpan pinjam yang sukses, dapat mendukung biaya pendidikan, membangun center Pekka, menghindarkan dari jeratan rentenir, menawarkan jasa paralegal dan mengembangkan jaringan koperasi yang menggerakkan pasar di desa menawarkan makanan dengan harga yang wajar. Pada akhirnya, koperasi dapat beroperasi secara signifikan untuk kemandirian lokal.

Koperasi juga menjadi platform bagi para perempuan untuk menuntut ruang di ranah publik. Setiap koperasi Pekka memiliki semboyan masing-masing, untuk

memastikan nilai dan martabat para anggotanya; di salah satu desa, motonya adalah " Lihat Saya, Saya Kuat". Beberapa di antaranya menamakan kelompok mereka dengan nama bunga, seperti melati atau mawar, atau juga menggunakan nama pahlawan Indonesia seperti Cut Nyak Dien atau Kartini; yang lainnya memakai istilah yang memotivasi seperti *Senang Hati, Murah Rezeki, Sumber Rezeki atau Putri Mandiri*.

Kami Memulai dari Nol

Kami memulai dari nol, berbicara kepada masing-masing perempuan untuk mencari tahu kepedulian utama mereka. Perempuan selalu memulainya dengan masalah uang. Jadi kami mulai dengan proyek kelompok tabungan sebagai cara praktis untuk membuat perempuan bisa bersama dan juga menanamkan strategi untuk menolak konsumerisme dan utang. Awalnya, mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak memiliki uang, namun kemudian dengan menyisihkan sejumlah uang receh yang biasanya mereka gunakan setiap kali untuk membeli permen anak-anaknya atau minuman kemasan, mereka bisa menabung sedikit. Terkadang mereka mengumpulkan kelapa dan kemudian menjualnya. Memulai dengan sedikit simpanan, para perempuan tersebut mampu menabung dalam upaya ekonomi bersama yang menghasilkan keuntungan yang berkembang dari waktu-ke waktu, jika mereka berhemat dan bekerja keras. Mereka mengatur pengahasilannya sendiri, dengan tidak meminjam kepada orang lain. Semakin banyak perempuan memiliki uang di tangan, mereka memiliki daya tawar terhadap saudara maupun pasangannya. Secara pribadi, mereka lebih mandiri dan secara kelompok, mereka mulai memahami potensi dari kondisi ekonomi dan kekuatan poilitiknya.

Dengan membentuk koperasi yang demokratis, sebagai bentuk dari sebuah lembaga kredit, para perempuan itu juga mempraktikkan kepemimpinan baru, mengambil keputusan dan demokrasi; satu perempuan, satu suara, kesetaraan hak. Sebuah tuntunan untuk lebih praktis dan mandiri secara emosional. Tentu saja, ini membutuhkan penumbuhan kesadaran dan pengembangan kapasitas. Itu adalah peran LSM yang tepat, kami merasa; bukan memberikan uang dan mengambil keuntungan dari bunga yang dibayarkan oleh para perempuan. Demokrasi dan kepemimpinan partisipatif memang tak bisa menghindar dari gesekan dan konflik internal-orang selalu menolak melakukan sesuatu yang berbeda. Beberapa dari mereka ingin mengambilalih dan oleh karenanya kita melakukan penggantian kepemimpinan setiap tiga tahun sekali. Itu adalah peran kami sebagai penggiat di PEKKA, mendukung gerakan akar rumput perempuan yang bertumbuh- untuk mengembangkan dan mendukung bentuk baru dari kepemimpinan dan untuk membangun kapasitas perempuan dan mengelola konflik, kemampuan merencanakan dan tugas dasar dan juga secara bertahap bagaimana menggunakan kekuatan bersama untuk mempengaruhi kondisi politik tingkat lokal maupun nasional.

Kami tidak menjadi bagian dari koperasi yang telah didirikan. Mereka mengembangkan sendiri secara bersama-sama. Dari keuntungan yang mereka dapatkan dengan meminjamkan simpanan, dalam beberapa kasus mereka mampu membangun center mereka sendiri. Pengorganisasian ekonomi dengan cara ini memungkinan mereka untuk menjalankannya di bawah pemerintahan yang menindas sekalipun. Kami katakan,"Kita menyimpan uang dan memberikan pinjaman, sementara pemerintah meninggalkan kita sendirian". Dari waktu ke waktu, pengalaman membuktikan bahwa perempuan akan mendukung pemimpin dari mereka sendiri untuk menjadi kepala desa atau anggota BPD. Dari situlah, mereka memiliki pengaruh, memperoleh kekuatan lebih besar dan melakukan perubahan yang lebih besar.

Sekarang mereka memiliki mimpi yang tak terbatas- rumah singgah untuk perempuan lanjut usia, rumah sakit, sekolah, bank milik sendiri, terpilih menjadi kepala desa dan duduk di lembaga dewan.

(Zulminarni and Miller 2015)

2. Mengkaitkan Koperasi untuk Dampak yang Lebih Luas

Proses membangun gerakan yang efektif bergantung pada kemampuan berbagai kelompok dan para pengurus dalam membangkitkan dan mengkonsolidasikan kepercayaan diri dan pemahaman politik anggota untuk berkomitmen terhadap keadilan sosial. PEKKA telah merekrut dan melatih pengurus dan fasilitator yang terampil, berkualitas dan berbakat -penggiat pendidikan populer feminis- untuk membantu mendalami, menginspirasi dan mempercepat pengetahuan, bakat dan kompetensi dari pada anggota dan masyarakat. Pada tahun 2015, PEKKA telah mengidentifikasi dan melatih 5.900 kader dan pemimpin dan angkanya terus meningkat sebesar 15 persen setiap tahunnya. (*PEKKA 2016:15*). Menambah jumlah, ruang lingkup dan kualitas dari para pengurus dibutuhkan sebagai prioritas modal sejumlah organisasi dan pada pemberi dana yang bekerja untuk keadilan sosial, karena upaya membangun gerakan membutuhkan dukungan dan visi jangka panjang. Berbasis pada serikat-serikat lokal ini lah, PEKKA telah menanamkan sebuah proses transisi dari organisasi yang bergantung kepada staf menjadi organisasi nasional yang dijalankan oleh anggotanya.

Pendirian Federasi Pekka tingkat nasional yang mandiri pada tahun 2013 merupakan puncak dari proses demokrasi, kepemimpinan dan pengembangan organisasi yang dijalankan selama tujuh tahun. Hal ini bisa terwujud dengan keterlibatan dari berbagai upaya pengorganisasian dan pendidikan dengan menggandeng beragam koperasi Pekka di seluruh Indonesia. Perwakilan yang terpilih dari serikat Pekka di setiap provinsi diundang dalam forum nasional lima hari di Jakarta, di mana mereka mendiskusikan Anggaran Dasar/Rumah Tangga dan bersepakat untuk membentuk federasi tingkat nasional guna membawa aspirasi mereka ke tingkat nasional dan terlibat dengan gerakan perempuan nasional yang bergerak di bidang advokasi. Mereka menggelar pemilihan demokratis untuk posisi ketua, sekretaris dan bendahara federasi. Pada awal tahun 2018, federasi yang didirikan memiliki sekretariat nasional di Jakarta yang dijalankan oleh tiga pemimpin terpilih. Federasi tersebut memiliki struktur operasional berjenjang yang menghubungkan koperasi di 1.232 desa mencakup 20 provinsi. Serikat Pekka sendiri telah memiliki kapasitas advokasi pada tingkat kabupaten, Tetapi proses federasi yang diorganisir secara bertahap telah menguatkan kapasitas mereka dalam memimpin advokasi di tingkat nasional.

Untuk struktur saat ini, penyelenggaraan musyawarah di tingkat di desa, provinsi dan nasional diselenggarakan setiap tiga tahun sekali. Dalam forum ini, mereka mengungkap sejumlah keberhasilan, mengidentifikasi isu-isu penting dan penjajakan untuk melakukan aksi, memilih perwakilan mereka dan pemimpin organisasi serta menyusun prioritas ke depan. Proses ini-menghubungkan koperasi di dalam provinsi dan mengandeng mereka bersama dalam sebuah federasi- memperkuat kebutuhan dalam praktik berwarganegara dan berdemokrasi untuk menjaga akuntabilitas pemerintah dalam jangka panjang. *Lebih jauh tentang strategi PEKKA, lihat gambar 3*.

Gambar 3. Apa strategi PEKKA?

Empat Pilar Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga PEKKA

Sumber: PEKKA

VI. Pengembangan Kepemimpinan Perempuan Melalui Aksi dan Pelatihan Berkelanjutan

1. Keterampilan Kepemimpinan dalam Koperasi

Mengingat fokus PEKKA mencakup penyelesaian kebutuhan ekonomi hingga perubahan hubungan kekuasaan jangka panjang, maka pengembangan keterampilan dasar membantu menyiapkan perempuan dalam pengambilan keputusan, memimpin organisasi mereka dan terlibat dengan mitra dan aparatur pemerintah pada berbagai level. Ketika perempuan di koperasi secara perlahan mampu menyimpan dan mengumpulkan sumberdaya, para penggiat PEKKA bekerja dengan mereka menggunakan proses pendidikan feminis populer (*lihat Boks 3*). Termasuk metodologi yang menjadi tantangan perempuan untuk menguji asumsi dan keyakinan, dan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis guna menguji konteks dan pengalaman dalam dinamika berbagai kekuatan masyarakat

Boks 3. Apa itu pendidikan populer feminist?

Sebuah pendekatan partisipatif, penyelesaian masalah sebagai pembelajaran dan melakukan aksi berdasarkan kehidupan nyata perempuan- mendorong pemikiran kritis, solidaritas dan strategi melakukan perubahan, yang secara bersamaan menghadapi tantangan dan mengubah dinamika kekuasaan yang mempertahankan ketidaksetaraan dan diskriminasi berbasis gender, ras, kelas sosial, usia dan orientasi seksual.

Proses pemilihan pengurus serikat Pekka Sumatera Utara tahun 2013, yang menanamkan nilai demokrasi, mendukung pemimpin perempuan dan memperkuat organisasi perempuan akar rumput. Sumber: PEKKA

Pendekatan pelatihan para feminis bersifat partisipatif, didorong rasa keingintahuan, sukacita dan persahabatan, serta menjadikan kebijakan dan pengetahuan praktis perempuan sebagai sumber inspirasi. Anggota menganalisa masalah nyata, mengembangkan strategi untuk melaksanakan dan mempelajari cara menghadapi tantangan yang tak dapat dihindari dan konflik yang timbul. Ketika perempuan melakukan aksi, penggiat PEKKA memberikan kesempatan kepada mereka melakukan refleksi kritis pengalaman mereka sehingga mereka dapat belajar dari kesuksesan maupun kegagalan. Penekanan pada pemberdayaan termasuk peningkatan kesadaran, analisis kekuasaan dan kemampuan bernegosiasi.

Pelatihan praktis tentang isu-isu yang bervariasi mulai dari model pengambilan keputusan dan sistem akuntasi dasar harus dimengerti sebagai landasan dari kesuksesan koperasi hingga membangun gerakan. Pengurus koperasi menerima pelatihan tambahan terkait kepemimpinan termasuk didalamnya proses demokrasi, politik, manajemen usaha dan pengembangan organisasi.

2. "Perempuan Berdiri Tegak dan Kuat": Berdirinya Akademi Paradigta

PEKKA memperkuat pengembangan kepemimpinan dengan mendirikan pusat pelatihan yang diperuntukkan baik untuk anggotanya maupun anggota organisasi masyarakat sipil lainnya guna meningkatkan kapasitas agar dapat terlibat di masyarakat, musyawarah publik dan pengambilan keputusan. Pada tahun 2015, PEKKA mengembangkan kurikulum, modul dan panduan untuk mendirikan Akademi Paradigta (*Lihat Boks 4*) (*PEKKA, 2017*). Istilah paradigta berasal dari bahasa jawa kuno yang berarti " seorang perempuan yang berdiri tegak dan kuat".

Akademi Paradigta dirancang sebagai sebuah proses pembelajaran terapan dan pendidikan untuk mempersiapkan perempuan lokal dalam berorganisasi dan memimpin di ranah publik, termasuk dalam proses anggaran desa (*PEKKA, 2016*). Kurikulum terdiri dari tiga elemen kunci yaitu: penguatan diri, membangun anggota dan penguatan masyarakat serta peningkatan kapasitas teknis. Fokus berikutnya adalah pemahaman tentang struktur pemerintahan, hukum, lobi dan penganggaran,

Boks 4. Modul Pelatihan Akademi Paradigta

1. Pengantar dan Penulisan
2. Pemahaman tentang desa dan sejarahnya
3. Perubahan dan mimpi akan masa depan
4. Kepemimpinan perempuan
5. Undang-undang Desa
6. Pemerintahan dan Anggaran
7. Pelayanan Pemerintah
8. Pengawasan dan Hak
9. Isu-isu Utama
10. Kepedulian politik dan kekuasaan
11. Advokasi
12. Komunikasi
13. Pengorganisasian Masyarakat

yang dibutuhkan untuk memberikan dampak dan pengaruh terhadap suatu keputusan.

Program ini didesain untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan perempuan agar dapat berpartisipasi dalam pemerintahan tingkat desa, termasuk proses perencanaan pembangunan desa, pemantauan layanan publik dan bekerjasama dengan pimpinan desa. Syarat perekrutan peserta pelatihan termasuk kemampuan melek huruf, fasih menggunakan bahasa Indonesia, memiliki pengalaman dalam kegiatan masyarakat dan keinginan menerapkan keterampilan yang diperoleh di masyarakat. Kepala desa juga berperan mengusulkan perempuan yang akan ikut program Akademi Paradigta. Modul pelatihan mencakup 25 persen diselenggarakan di ruang kelas, di mana para peserta pelatihan akan menghadiri 25 hari pelatihan dalam periode satu tahun dan 75 persen sisanya praktek di lapangan (*PEKKA 2017:13*). Setiap minggunya, peserta pelatihan menghadiri tiga sesi (masing-masing tiga jam) yang difasilitasi oleh seorang koordinator; setiap perempuan juga akan didampingi oleh seorang mentor. Terdapat tujuh pusat pendidikan Akademi Paradigta di Indonesia dan masing-masing desa terpilih dapat mengirimkan lima peserta perempuan. Pada tahun 2016, program 12 bulan Akademi Paradigta telah meluluskan 482 perempuan, dengan tingkat kelulusan mencapai 80 persen (*PEKKA, 2017:18*). Total sebanyak 2.500 perempuan telah terdaftar pada tahun 2017.

Para peserta Akademi Paradigta (Program Pelatihan Kepemimpinan) di Jawa Barat membacakan ikrar pada acara kelulusan; siap membangun keadilan sosial dan kehidupan yang bermartabat. Sumber: PEKKA

Salah satu dari lulusan pertama Akademi Paradigta, Waode (22 tahun) asal Sulawesi Tenggara, mengatakan: "Saya sangat senang, khususnya telah mengetahui lebih banyak soal anggaran desa, perempuan di ruang publik, kepemimpinan perempuan, Undang-undang Desa, organisasi dan lembaga di desa. Awalnya saya malu berbicara di depan publik, namun sekarang saya lebih percaya diri dan menjalin hubungan pertemanan dengan perempuan dari desa lain." (*PEKKA, 2017*).

3. Pembukaan Peserta Pelatihan Akademi Paradigta: Desentralisasi dan Undang-Undang Desa di Indonesia

Pada saat Akademi Paradigta mengkonsolidasi strategi jangka panjang PEKKA untuk pengembangan kepemimpinan, Undang-Undang Desa Indonesia tahun 2014 membuka peluang baru untuk menerapkan kemampuan tersebut. Paradigta menyiapkan pemimpin masyarakat dan anggota Pekka untuk terlibat dalam pengganggaran dan perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Idenya adalah memastikan perempuan memperoleh informasi dan sebagai warga terlibat baik sebagai pelaku maupun pemantau proses jalannya pemerintahan di masyarakat.

Sejak tahun 2001, proses desentralisasi di Indonesia telah memberikan tanggung jawab perencanaan pembangunan dan anggaran yang signifikan kepada pemerintahan desa. Sejarah menunjukkan, perempuan dikucilkan dari ruang publik dan pengambilan keputusan di desa- khususnya perempuan muda (*Feruglio, dkk 2017*).[10] Pendekatan pertama pemerintah terhadap desentralisasi adalah memberikan dukungan kuat pada masyarakat dalam memantau kekuasaan kepala desa, namun reaksi mereka justru mengalami kemunduran

dalam melakukan langkah-langkah akuntabilitas pada tahun 2014 (*Antlov, Wetterberg dan Dharmawan, 2016*). Dengan Undang-Undang Desa, pendulum kembali berayun membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat, mengembangkan perencanaan pembangunan pedesaan partisipatif yang pernah ada sebelumnya. Undang-undang tersebut juga mengatur inovasi "akuntabilitas ke bawah", yaitu semacam dewan masyarakat (*Antlov, dkk, 2016*), dan peningkatan signifikan anggaran lokal untuk investasi sosial.

Undang-Undang Desa menawarkan kesempatan menyertakan suara perempuan dalam pengambilan keputusan publik, termasuk potensi partisipasi dalam proses pengganggaran. Namun dalam prakteknya, undang-undang yang menegaskan komitmen untuk memberikan ruang yang lebih luas untuk seluruh elemen masyarakat berperan serta, tidak berlaku bagi perempuan desa yang miskin (seperti perempuan kepala keluarga yang merupakan anggota Pekka) untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan di desanya. Contohnya, atas nama desentralisasi, aparat pemerintah tingkat kabupaten dan desa dapat membuat peraturan untuk masyarakat yang menghalangi partisipasi dan hak perempuan. Dalam konteks ini, jaringan dan organisasi perempuan lokal yang terlatih meletakkan dasar untuk merealisasi potensi undang-undang desa, dengan mengajukan proposal untuk inisiatif pembangunan yang inklusif. Tindakan nyata memperkuat kepemimpinan perempuan akar rumput dan kapasitas organisasi mereka untuk mengutamakan kebutuhan dan tuntutan- khususnya bagi perempuan kepala keluarga- harus terus dilakukan untuk memastikan perempuan mampu mengambil peran sentral dalam pemerintah tingkat desa.

Disamping menjalankan advokasi selama bertahun-tahun untuk mendukung pendekatan inklusif dan sensitif gender terhadap pemerintahan desa, PEKKA juga berperan dalam memberikan konsultasi resmi dalam mengimplementasikan regulasi Undang-Undang Desa. PEKKA bergabung bersama koalisi organisasi hak-hak perempuan yang lebih luas yang berbasis di provinsi untuk mengembangkan kerangka dasar yang lebih rinci bagi reformasi pemerintahan desa yang inklusif (*ringkasan lihat Boks 5*). Sementara versi final dari implementasi regulasi masih lemah dalam hak-hak gender,

Kegiatan Keaksaraan Fungsional bagi anggota Serikat Pekka Yogyakarta, yang bersemangat belajar membaca dan menulis pada usia lanjut. Sumber: PEKKA

beberapa aturan dalam Undang-Undang Desa memberikan ruang kepada perempuan untuk menjadi pemimpin. Sebagai contoh, sementara kuota gender yang diajukan belum disetujui, tetapi peraturan ini mendukung suara perempuan dalam pengambilan keputusan.

Boks 5. Masukan dan Pandangan kritis Dari Gerakan Perempuan Indonesia untuk Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Administrasi Tingkat Desa, Jakarta, 2-3 Mei 2014.

Berdasarkan pada rilis dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Administrasi Tingkat Desa pada tahun 2014, Gerakan Perempuan Indonesia, melalui 55 perwakilan yang meliputi hampir seluruh wilayah di Indonesia, menyelenggarakan sebuah workshop dan diskusi kelompok terfokus untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut terhadap perempuan. Berdasarkan studi terhadap Draft Peraturan Pemerintah Tentang Implementasi dari Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa, kelompok tersebut menyatakan bahwa peraturan tersebut perlu mempertimbangkan secara komprehensif perbedaan sosial, ekonomi, budaya dan konteks politik yang mempengaruhi perempuan di Indonesia, guna menjaga semangat, prinsip dan tujuan dari undang-undang tersebut.

Selain itu, catatan lainnya adalah bahwa RPP harus merefleksikan semangat, prinsip dan tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan Undang-Undang No.7/1984 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.

Berikut adalah sejumlah rekomendasi perubahan atas RPP yang didasarkan pada jaminan konstitusional dan peraturan lainnya bagi setiap orang, termasuk perempuan di pedesaan dan penduduk perempuan asli, yang dapat diterapkan di seluruh desa.

1. Adanya kuota minimal 30% bagi perempuan dalam seluruh jajaran pemerintahan desa, termasuk Kades, Perangkat Desa, dan BPD, termasuk panitia pemilihan Kades dan BPD, daftar bakal calon, kelompok masyarakat yang terlibat dalam Forum Konsultative Desa, dimana keterlibatan perempuan terwujud melalui 'kelompok perempuan' yang terbatas.

2. Adanya mekanisme yang demokratis, terbuka dan akuntabel, sesuai UU yang belaku, untuk menjamin agar Perdes (Peraturan Desa), Perdat (Peraturan Desa Adat) serta peradilan adat tidak bertentangan dengan UU, termasuk yang melindungi setiap orang dari tindakan diskriminasi atas dasar apapun.

3. Adanya alokasi 30% anggaran desa yang secara proporsional memperhatikan variabel responsif gender serta mengatur pagu yang terukur mengenai belanja publik: pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat.

4. Adanya pengaturan pengelolaan kekayaan alam Desa Adat sebagai hak sepenuhnya bagi perempuan dan laki-laki dilandasi oleh pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat, termasuk warga perempuannya.

5. Adanya pengaturan secara tegas akses dan kontrol perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, kesetaraan akses bagi perempuan pada layanan.

6. Adanya ketentuan khusus tentang pengembangan kader perempuan lokal.

7. Adanya pengembangan sistem informasi desa yang responsif gender dan jaminan keterbukaan informasi.

Ini adalah ringkasan dari rekomendasi yang dibuat oleh peserta Konvensi Gerakan Perempuan Indonesia pada 2-3 Mei 2014 di Jakarta. Untuk membaca dokumen lengkap dan daftar yang menandatanganinya, lihat https://accountabilityresearch.org/publication/movementbuildingforaccountability/.

Undang-Undang Desa yang baru dan kesempatan partisipasi bagi perempuan, adalah salah satu faktor yang mendorong PEKKA untuk menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan melalui Akademi Paradigta, sebagai bagian dari fokus strategi implementasi di tingkat kabupaten dan desa. Di daerah di mana PEKKA telah memiliki basis yang kuat, pengetahuan mendalam PEKKA tentang seluk-beluk hukum dan dukungan potensial pada pelaksanaannya telah memberikan kesan kepada pejabat lokal, yang melihat partisipasi anggota PEKKA dalam proses penganggaran dan perencanaan. Contohnya di Kalimantan Barat, di mana program advokasi dan pelatihan PEKKA yang fokus pada transparansi dan penganggaran yang partisipatif, Bupati menanggapi secara positif proposal yang diajukan dan mengalokasikan sedikitnya 10 persen dari anggaran untuk pemberdayaan perempuan.

Pelatihan kepemimpinan adalah bagian dari pendekatan bertahap PEKKA, dimulai sejak para penggiat advokasi setempat mengadvokasi penganggaran yang partisipatif dan akuntabilitas publik di tingkat kabupaten. Terkadang, bupati membantu mendekati kepala desa agar mendengarkan suara perempuan - dan mereka menjadi lebih responsif dibanding Kementerian Desa. PEKKA terlibat dalam proses perencanaan pemerintah lokal mulai dari tingkat desa hingga ke kabupaten pada 76 kabupaten di 20 provinsi dan enam orang anggota kini terpilih menjadi kepala desa (*lihat Boks 6*).

KLIK, Klinik Hukum di Sulawesi Selatan, di mana paralegal terlatih dari PEKKA menyediakan bantuan hukum bagi anggota masyarakat.
Sumber: PEKKA

Box 6. Petronela Peni – Kepala Desa Perempuan pertama di Flores Timur

Petronela Peni Loli atau lebih dikenal dengan panggilan Nela adalah seorang janda. Ia memutuskan untuk maju menjadi kepala desa di Desa Nisa Nulan atas permintaan sesepuh tradisional setempat setelah dua dari tiga kandidat yang mewakili dusun lainnya mengundurkan diri dari pemilihan. Sebenarnya itu bukan tawaran dukungan yang serius, karena mereka hanya memanfaatkannya untuk mengisi kekosongan calon. Sebagai perempuan, pada waktu itu banyak yang berpikir sepertinya (bahkan tidak mungkin) baginya untuk terpilih sebagai kepala desa.

Namun, keputusannya untuk maju sebagai kepala desa, hanya untuk dihujani dengan pelecehan, cemoohan dan kata-kata menghina dan bahkan ada surat kaleng yang tersirat menyatakan bahwa perempuan bukanlah pemimpin yang cocok. Salah satu surat mempertanyakan: "Apakah Lewotanah akan dipimpin oleh seorang perempuan yang diragukan latar belakangnya?". Berkat dukungan penuh dari PEKKA dan keluarganya, Nela memperoleh kepercayaannya kembali. "Surat kaleng itu dibuat oleh segelintir orang yang tidak setuju dengan kamu. Jadi, jangan terlalu reaktif. Kamu harus maju, hadapi pemilihan dan jadikan ini pengalaman paling berharga," tegas Dete, pekerja lapang PEKKA yang menyemangati Nela. Pada kesempatan pertama untuk menyampaikan visi dan misi nya, Nela menegaskan: "Saya tidak sendiri berkomitmen untuk Lewotanah. Jika kita ingin perubahan untuk Lewotanah, mari kita duduk dan berdiskusi bersama, bertindak bersama! Saya percaya akan ada perubahan, tidak hanya fisik tetapi juga manusia haruslah berkembang." Pada saat pemilihan Nela memperoleh suara terbanyak.

Nela menghadapi sejumlah tantangan sepanjang ia menjadi kepala desa. Ia mengatakan bahwa ia mengatasi semua masalah dengan mendiskusikannya bersama sosok berpengaruh guna mengenali akar masalah dan mencari jalan keluarnya. Melalui kerjasama dengan masyarakat setempat, kepemimpinannya telah membawa sejumlah hasil dari kegiatan pembangunan yang diimplementasikan di desa Nisa Nulan, termasuk membangun jalan dan lajur lintas batas Koli-Sagu, pemasangan pipa air untuk meningkatkan akses air minum, listrik sumber energi untuk desa, rumah layak huni, dua posyandu, membersihkan dan mengolah lahan desa untuk pertanian dan peraturan penyederhanaan adat ritual kematian dan budaya pemakaman.

Nela berharap ke depan, akan lebih banyak lagi perempuan yang dapat menjadi pemimpin di setiap level. Ia percaya bahwa perempuan tidak mesti harus menunggu lama, karena itu mereka harus menangkap peluang yang ada, khususnya ketika Undang-Undang Desa saat ini memberikan setiap warga peluang untuk ikut serta dalam pembangunan desa, yang mana akan membuat kepala desa bekerja dengan lebih mudah."Yang paling penting adalah mendelegasikan kewenangan dan tugas, lebih dekat dengan masyarakat dan mendengarkan satu sama lain. Hal ini akan menuju ke arah yang lebih baik. Saya merasa puas dan senang melihat masyarakat setempat tersenyum, merasa aman dan hidup damai setelah enam tahun bersama dalam suka dan duka. Terima kasih Tuhan. Saya berterima kasih kepada Lewotanah, tempat tinggal saya," ungkap Nela mengakhiri pembicaraan.

Keterlibatan PEKKA dalam pemerintah desa dan kabupaten termasuk juga dalam pengawasan berbasis masyarakat dan mekanisme umpan balik yang memunculkan tekanan yang proaktif dari publik untuk akuntabilitas di tingkat desa dan di atasnya. Klinik Hukum atau KLIK, adalah klinik hukum yang dikelola paralegal Pekka terlatih, menyediakan layanan untuk masyarakat. Secara bersamaan, mereka menangani masalah spesifik masyarakat sekaligus mengumpulkan informasi jenis masalah yang dihadapi masyarakat. Isu dan masalah yang dihadapi perempuan yang muncul melalui KLIK, kemudian didiskusikan di *Multi-Stakeholder Forum* (MSF) tingkat kabupaten di mana PEKKA mengadvokasi perubahan kebijakan dan anggaran dengan lembaga

pemerintah dan pengadilan. Di sejumlah kabupaten, pemerintah menawarkan hadir di KLIK sebagai cara memberikan informasi dan layanan di tingkat desa agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, KLIK bertindak sebagai saluran untuk berbagi antar masyarakat desa dengan pengadilan dan pemerintah serta menyediakan mekanisme bagi pengadilan dan pemerintah untuk bekerjasama dengan PEKKA dan memberikan layanan di tingkat desa yang biasanya baru tersedia dengan melakukan perjalanan ke kota kecamatan atau kota kabupaten. Dengan bantuan dari fasilitator PEKKA, informasi dari KLIK akan disampaikan kepada perwakilan pemerintah pada pertemuan rutin MSF. Isu yang tercakup dalam pertemuan tersebut adalah kualitas layanan kesehatan dan kehadiran staff, penurunan angka kemiskinan, layanan pemerintah (kualitas dan proses), kehadiran guru dan juga terkait isu hukum keluarga yang perlu dibawa ke pengadilan. Ketika hubungan berjalan dengan baik, staf desa merasa mendapat dukungan, karena terbantu dengan baik merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

VII. Kemitraan Penelitian Partisipatif Mendorong Data Resmi untuk Pengakuan Perempuan Kepala Keluarga

Pada tahun 2000, ketika Komisi Nasional Perempuan untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mengundang Nani Zulminarni untuk mendokumentasikan kehidupan para janda, ia menggunakan proyek penelitian ini sebagai fondasi bagi terbentuknya PEKKA. Sebuah motivasi awal untuk memastikan bahwa kerja-kerja yang dilakukan secara langsung menguntungkan perempuan marjinal di Indonesia. Ia menerima tawaran ini dengan menegosiasikan rancangan penelitian dengan pemberi dana untuk melibatkan perempuan di dalam proses penelitian, tidak sekedar sebagai subjek penelitian. Ini adalah pengalaman awal keterlibatan PEKKA selanjutnya dalam sejumlah penelitian partisipatif, khususnya terkait akses terhadap keadilan.

Pada tahun 2007, telah dilakukan survey terhadap anggota Pekka untuk sebuah studi yang didukung oleh Australian Agency for International Development (AusAID), bernama *Access and Equality*, yang menyoroti berbagai tantangan dalam hal akses terhadap keadilan, khususnya di wilayah pedesaan Indonesia. Untuk perempuan desa, biaya dan beban sosial untuk mengakses pengadilan merupakan hambatan utama; 9 dari 10 perempuan kepala keluarga yang disurvey tidak dapat mengakses pengadilan untuk mengurus kasus perceraian mereka seperti disyaratkan oleh undang-undang di Indonesia (*Sumner 2010, 2011*). Pada tahun 2018, ditemukan bahwa biaya rata-rata untuk mengurus kasus di pengadilan adalah empat kali lipat lebih tinggi dari pendapatan per kapita per bulan dari masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan secara nasional (*Sumner 2011*). Sepanjang tahun 2007 dan 2008, Sekretariat Nasional PEKKA mengadvokasi perubahan sistem dengan berbagi temuan ini dengan Mahkamah Agung Indonesia dan Badilag (Direktorat Jenderal Pengadilan Agama). Hasilnya tercermin dalam beberapa kebijakan yang memungkinkan akses yang lebih luas bagi perempuan kepala keluarga terhadap proses keputusan dalam undang-undang perkawinan, termasuk meningkatkan anggaran pengadilan untuk menghapus biaya pengadilan bagi perempuan yang kesulitan keuangan dan sidang keliling di wilayah terpencil untuk mendekatkan layanan pengadilan kepada perempuan. Di beberapa wilayah, PEKKA mengundang pengadilan untuk menggelar sidang keliling di Center PEKKA dan juga aktif terlibat dalam pencatatan pengesahan pernikahan dan kasus lainnya bersama pengadilan sebagai bagian dari layanan KLIK. Hal ini pada akhirnya meningkatkan posisi dan kedudukan anggota PEKKA karena telah menunjukkan kemampuan mereka dalam berhubungan dengan pengadilan dan lembaga pemerintah lainnya guna memberikan layanan tersebut di tingkat desa (*Sumner dan Zulminarni, 2018*).

Pada tahun 2009, PEKKA mulai menjalin kemitraan yang lebih erat dengan Australia Indonesia Legal Development Facility dan the Family Court of Australia untuk menjalankan proyek penelitian Access and Equity yang kedua bersama dengan Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama di Indonesia (*Sumner, 2010*). Anggota PEKKA benar-benar terlibat mulai dari melakukan survey tersebut termasuk melakukan survey kepuasan pengguna pengadilan terhadap pengadilan, survey profesionalitas hukum dan analisis berkas kasus. PEKKA terlibat pada survey tentang kemiskinan dan akses hukum pada 600 perempuan kepala keluarga.

> "Proses riset ini dirancang khusus untuk mencapai dua tujuan: mengumpulkan data kasus untuk mendapatkan pengakuan perempuan kepala keluarga dan untuk meningkatkan kemampuan analisis anggota PEKKA. Dengan demikian, riset aksi ini secara bersamaan membangun kemampuan dan kredibilitas lembaga dan mengedepankan agenda advokasi yang penting bagi anggotanya"

Tahap awal kemitraan partisipatif antara PEKKA, pengadilan di Indonesia dan Australia kemudian diperluas melalui kerjasama dengan Lembaga Riset berpengaruh

yaitu SMERU,[11] untuk memastikan legitimasi data untuk kegunaan advokasi dan kualitas kemampuan pengumpulan informasi yang diperoleh oleh staf PEKKA dan anggota masyarakat. Data tersebut menvalidasi pengalaman perempuan dan mendorong keterlibatan langsung mereka dalam advokasi (*sebagai contoh., Akhamdi, Budiyati dan Yumna, 2010*). PEKKA secara konsisten menjalin kemitraan dengan peneliti ilmu terapan untuk mendukung kredibilitas teknis mereka di hadapan para pengambil keputusan.

PEKKA juga bekerjasama dengan lembaga sensus Indonesia, untuk advokasi kategori-kategori dan daftar pertanyaan untuk memotret perempuan kepala keluarga agar lebih akurat. Pada tahun 2011 dan 2012, dalam kolaborasi lebih lanjut dengan SMERU, para peneliti di Sekretariat Nasional PEKKA, melakukan sebuah survey terhadap 89.960 keluarga-15.644 (17 persen) di antaranya dikepalai oleh perempuan- di 111 desa melalui Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK) (Sekretariat Nasional PEKKA dan SMERU Research Institute, 2014). Dari 950 enumerator, 85 persen di antaranya adalah perempuan dan sebagian besar adalah anggota PEKKA. PEKKA menggunakan data ini untuk mendukung advokasi kebijakan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengubah fokus pemerintah dalam mendefinisikan (laki-laki) sebagai "Kepala Keluarga" kepada definisi "keluarga" yang lebih netral jender sebagai syarat utama kelayakan menerima program sosial. PEKKA juga mengadvokasi untuk memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih akurat dalam mengidentifikasi bahwa jika seorang perempuan adalah kepala di dalam rumah tangganya atau kepala dalam keluarganya seperti tercantum dalam Survey Terbaru Penyatuan Database Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) (Kumpulan Data untuk Program Jaminan Sosial) pada tahun 2011 dan 2015, yang mana merupakan implementasi penting untuk program penghapusan kemiskinan.[12]

Hasil survey tersebut belum lama ini telah dirilis dan PEKKA saat ini dalam proses untuk mengajukan dan menganalisis data yang lebih tepat yang dibutuhkan untuk mengenali kecenderungan dari keterlibatan perempuan kepala keluarga. Kerja analisis tambahan ini dibutuhkan karena ketika sensus saat ini mengakui perempuan kepala keluarga, definisinya terbatas pada janda dan perempuan yang bercerai secara resmi. Berbeda dengan pendekatan yang dilakukan PEKKA, kategori sensus tidak memasukkan perempuan tidak menikah yang manjadi ibu atau bertanggungjawab atas orangtuanya ataupun saudaranya; tidak juga memasukkan perempuan yang suaminya pindah dan tidak mengirimkan uang selama bertahun-tahun. Namun dialog kebijakan antara PEKKA dengan lembaga sensus telah mendorong pemerintah untuk mengumpulkan informasi perempuan yang telah ditinggal suaminya selama lebih dari enam bulan, sehingga PEKKA akan bisa mengkombinasikan data tersebut dengan kategori resmi dari perempuan kepala keluarga.

Memang, keterlibatan yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang antara PEKKA dengan departemen teknis pemerintahan nasional, yang mana merupakan kolaborasi yang signifikan untuk memperoleh data lapangan, belum mengarah ke akses penuh terhadap data pokok resmi yang bisa menunjukkan perubahan akses perempuan terhadap program sosial pemerintah sebagai hasil dari upaya untuk memperluas hak untuk memperoleh identitas. Hal ini yang membatasi PEKKA untuk mendokumentasikan dampak dari kerjakerja yang telah mereka lakukan. Koperasi PEKKA mengumpulkan data dari anggota mereka di desa dalam beberapa isu pokok, termasuk layanan kesehatan dan jumlah dokumen identitas resmi. Namun demikian, menghubungkan pengumpulan data di tingkat lokal dengan pemantauan kecenderungan tingkat nasional merupakan tantangan tersendiri. Contohnya, PEKKA belum mengetahui bagaimana pemberian dokumen identitas berdampak pada jumlah perempuan yang telah mampu mengakses program anti kemiskinan dari pemerintah. Hanya lembaga pemerintah tingkat nasional yang memiliki kewenangan untuk mengubah siapa saja yang terdaftar untuk memperoleh akses terhadap program sosial, yang menggarisbawahi tantangan untuk mengaitkan pemantauan tingkat lokal dengan upaya-upaya advokasi pada level nasional. Ke depan, PEKKA menghadapi dilema berapa banyak waktu dan usaha yang dapat dialokasikan (atau seharusnya dialokasikan) dalam sebuah proses pemantauan.

VIII. Mempertahankan Hak-Hak Perempuan melalui Pembedayaan Hukum

Melalui proses pendirian koperasi dan membangun kepekaan anggota secara personal maupun kekuatan bersama secara intensif dan bertahap, para penggiat PEKKA belajar tentang berbagai isu yang mempengaruhi hidup perempuan. Banyak problem sentral dalam sistem hukum yang membatasi kemampuan perempuan untuk mengakses layanan publik atau sistem pada undang-undang perkawinan. Apakah janda atau bukan, perempuan miskin di desa menghadapi berbagai bentuk diskriminasi yang tertanam pada sistem keyakinan, otoritas keagamaan, sistem dan praktik hukum. Orang yang tinggal di desa hidup jauh dari kantor pengadilan dan berjuang untuk mengupayakan biaya resminya, membuatnya sulit untuk memperoleh dokumen identitas yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat atas pelayanan, atau ketika menghadapi masalah kekerasan rumah tangga dan perceraian. Perempuan yang memasuki ruang pengadilan seringkali diintimidasi dan tidak menperoleh informasi ketika memproses hak-hak mereka.

Untuk menyampaikan isu-isu tersebut, PEKKA membuat prioritas strategi dalam pemberdayaan hukum, mengembangkan program pendidikan dasar untuk anggotanya, menyeleksi dan melatih tim paralegal masyarakat yang bisa mendukung dan mendampingi perempuan di pengadilan (*lihat Boks 7*). Kerja-kerja PEKKA dalam pemberdayaan hukum perempuan memberikan pelatihan untuk paralegal tingkat desa yang berfokus pada kekerasan rumah tangga dan undang-undang perkawinan. Juga menyelenggarakan forum di tingkat kabupaten dengan mengundang para hakim, jaksa, polisi, NGO dan pemerintah untuk meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu gender (*World Bank, 2012*). Pendekatan ini juga termasuk menfasilitasi proses peradilan yang lebih efisien, yang mana PEKKA memperoleh dukungan dari aparatur penting pemerintah; pada saat yang sama, jalinan kerjasama hari per hari dengan pengadilan memungkinkan PEKKA untuk mengumpulkan dan berbagi kesaksian atas kebutuhan penyebarluasannya guna lebih memudahkan akses terhadap sistem pengadilan.

Berkolaborasi dengan Pengadilan Agama di Kabupaten Cianjur, PEKKA menyelenggarakan Layanan Sidang keliling untuk membantu perempuan memperoleh dokumen identitas hukum mereka. Sumber: PEKKA 2010

PEKKA berhasil melakukan advokasi dengan pengadilan untuk melakukan reformasi, termasuk meningkatkan dana sidang keliling, menghapus biaya pengadilan dan layanan penasehat hukum pada pengadilan (Pos Bantuan Hukum). Dimulai pada tahun 2011, Pengadilan Agama menerima dana anggaran yang memungkinkan pos bantuan hukum didirikan pada pengadilan tertentu untuk memberikan layanan hukum gratis bagi perempuan dan laki-laki untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan status hukum. Pada tahun 2017, 135 Pengadilan Agama menerima anggaran untuk menyediakan layanan penasihat hukum gratis dan lebih dari 185.000 perempuan dan laki-laki telah dibantu pada tahun tersebut (*Sumner dan Zulminarni, 2018*).

Satu dari sekian inovasi terkini adalah kesepakatan antara Mahkamah Agung untuk bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri guna menawarkan layanan terintegrasi untuk dokumen identitas hukum pada tingkat desa, dikenal dengan layanan keliling terpadu (Yandu). Ketiga lembaga tersebut memberikan lebih dari tiga layanan pada lokasi yang sama, pengadilan, yang melegalisasi perkawinan secara agama, Kantor Urusan Agama, yang memberikan buku nikah dan Kantor Catatan Sipil yang menyediakan akte kelahiran untuk anak hasil pernikahan. Inisiatif-inisiatif tersebut memudahkan akses atas hak-hak identitas menjadi kebijakan nasional melalui Peraturan Ketua Mahkamah Agung Indonesia pada tahun 2015 dan Intruksi dari Direktur Jenderal Pengadilan Agama pada tahun 2016 (*Sumner dan Zulminarni, 2018*).

Dengan melatih lebih dari 2.700 paralegal perempuan untuk mengidentifikasi kasus yang relevan dan menyediakan bantuan hukum cuma-cuma untuk anggota masyarakat (laki-laki dan perempuan), PEKKA secara aktif bekerja bersama dengan sidang keliling di Indonesia (*Sumner dan Zulminarni, 2018*). Para anggota masyarakat terlatih ini, yang setengahnya masih aktif di tahun 2017, telah membantu lebih dari 125.000 kasus yang berkaitan dengan isu rumah tangga dan mendukung lebih dari 65.000 anak-anak untuk menerima akte kelahiran- persyaratan formal untuk pendaftaran sekolah, mengikuti ujian nasional dan masuk ke universitas.[13] Namun hal ini belum selesai: untuk perempuan yang ingin mencatatkan sebagai kepala keluarga dalam kartu keluarga masih memerlukan syarat yang membuktikan bahwa suaminya telah meninggal atau mereka yang sudah bercerai, yang mana terus menjadi halangan bagi banyak orang. Lebih jauh untuk mengetahui kaitan antara pemberdayaan hukum dan akuntabilitas sosial, (*lihat Boks 7)*.

Boks 7. Kaitan antara Pemberdayaan Hukum dan Akuntabilitas Sosial

Terdapat hal menarik yang muncul dalam kaitan antara pemberdayaan hukum dan akuntabilitas sosial (*Maru, 2010*). Inisiatif akuntabilitas sosial melibatkan proses yang didorong oleh warga negara untuk mencari aspek akuntabilitas dari pemerintah di luar sistem pemilihan formal, penggunaan hak suara dan informasi, sementara strategi pemberdayaan hukum menyediakan informasi tentang hak-hak hukum dan kesempatan yang tersedia untuk mencari keadilan atas pelanggaran hak, dengan bantuan perantara hukum, seperti paralegal dari masyarakat. Seperti Joshi (*2017: 160*) sebutkan: "Kedua pendekatan memiliki banyak kesamaan- sebuah strategi meningkatkan dan memobilisasi kesadaran dan orientasi terhadap hak-hak yang diberikan negara dan kepedulian terhadap peningkatan layanan, menciptakan warga negara yang aktif dan melakukan perubahan yang berkelanjutan pada struktur pemerintahan." Disamping sinergi yang potensial, beberapa inisiatif secara relatif menjalin kedua pendekatan secara bersama-sama dalam skala tertentu- dan PEKKA adalah satu dari mereka.

Keterangan Gambar 9: Dua anggota PEKKA memperlihatkan dokumen identitas hukum yang mereka peroleh melalui Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi PEKKA di Sulawesi Selatan tahun 2014. Sumber: PEKKA

IX. Komunikasi untuk Pemberdayaan dan Pendidikan

Jaringan media PEKKA mengkombinasikan dua tujuan untuk memberdayakan perempuan, mengedukasi dan mempengaruhi pejabat pemerintah. Melalui pendekatan ini, perempuan belajar bagaimana membuat video mengunakan telepon seluler mereka tentang isu utama dan menggunakan sosial media dan stasiun radio komunitas PEKKA untuk menyoroti kerja-kerja mereka guna memperoleh dukungan dari para pengambil keputusan.[14] Membangun gerakan dan mempengaruhi proses seperti ini juga menambah kepercayaan diri perempuan dan jangkauan PEKKA dan juga memastikan bahwa kerangka komunikasi tersebut merefleksikan pandangan perempuan. Media komunitas PEKKA juga membantu mengokohkan posisi integral mereka terhadap kehidupan sosial dan penghormatan bagi martabat, kesehatan dan partisipasi perempuan.

Meskipun saluran media komersial bukanlah target utama di luar jangkauan PEKKA, mereka seringkali responsif untuk meliput strategi advokasi PEKKA. Mereka diundang untuk meliput banyak upaya dan kegiatan publik yang diselenggarakan PEKKA dalam hal kepedulian pada kebijakan prioritas, termasuk peluncuran kegiatan riset, festival PEKKA, rapat umum koperasi, diskusi panel dan sesi-sesi pelatihan. Liputan tersebut berkontribusi dalam mendukung akuntabilitas ketika PEKKA mensponsori acara di mana pejabat publik diminta secara terbuka dan resmi mendukung inistiatif dan reformasi yang dilakukan PEKKA. Media asing pada saat tertentu juga tertarik kepada PEKKA—contohnya, ketika televisi Jepang dan Al Jazeera menfilmkan kegiatan PEKKA pada minggu yang sama di bulan Desember 2011.

Kunjungan kepada koperasi pun disambut baik dan dipublikasikan sebagai bagian dari strategi untuk memperoleh legitimasi dan modal politik untuk program dan isu-isu advokasi bagi PEKKA. Beberapa orang desa menyatakan—"*Oh, perempuan-perempuan PEKKA itu menerima tamu*"—hal ini membantu untuk menghapuskan bias dan eksklusi sosial yang memisahkan dan merendahkan perempuan miskin, tidak memiliki pasangan, janda dan membawa mereka pada kekuatan dan legitimasi politk yang lebih besar.

Siaran radio pada komunitas radio PEKKA di Aceh, Indonesia. Sumber: PEKKA

X. Pembelajaran Strategis untuk Membangun Gerakan Perempuan

Dasar pengorganisasian akar rumput PEKKA, dikombinasikan dengan kerja advokasi kebijakan berbagai cabang dan berbagai tingkatan, telah menjadi pusat dari perkembangan perjalanannya yang dilakukan sejak tahun 2001. Anggota PEKKA menghadapi norma-norma eksklusi sosial, ide-ide konservatif kegamaan tentang perempuan dan kekuasaan nyata yang terikat secara strategis, yang secara ekonomi dan politik mengucilkan dan memarjinalisasi perempuan kepala keluarga. Bagian ini menyoroti beberapa pembelajaran utama yang diambil dari pengalaman membangun gerakan perempuan yang basisnya lebih luas.

1. Mengatasi sebab budaya dan kelembagaan dari eksklusi sosial guna membangkitkan kepercayaan diri dan ruang yang dibutuhkan bagi perempuan untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mengambil tindakan bersama.

a. Seperti halnya kebanyakan kaum marjinal yang dikucilkan di dalam masyarakatnya, anggota PEKKA menghadapi berbagai hambatan dari budaya patriarki, agama dan prasangka sosial-bentuk kekuasaan tak terlihat yang secara dalam merusak kemampuan mereka untuk mendapatkan suara publik. PEKKA membantu membebaskan perempuan dari pengaruh yang mendalam dari stigma, melalui pendidikan populer tentang feminisme yang bekerja untuk mengubah pandangan publik tentang perempuan kepala keluarga sehingga mereka memperoleh pengakuan dan keterlibatan sosial yang lebih besar. Dalam hal ini, dukungan dari ALIMAT dan suara dari para sarjana Islam liberal tersebut telah membantu untuk menetralisasi pengaruh dari kelompok fundamentalis dan kritik terhadap dukungan PEKKA untuk pemberdayaan perempuan.

b. PEKKA berkolaborasi dengan lembaga donor dan para mitra peneliti untuk melakukan proses penelitian partisipatif yang mengidentifikasi hambatan sistem administrasi hukum yang menghalangi perempuan kepala keluarga untuk memperoleh hak-hak lainnya yang lebih luas (seperti kesejahteraan sosial, dukungan keluarga, cara kerja hukum dan interpretasi dari hukum). Hal ini membuahkan hasil penetapan agenda dan mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri dari anggota sebagai pengumpul dan analis data, bersama dengan para peneliti profesional. Proses penelitian tersebut menerangkan fokus advokasi berkelanjutan PEKKA untuk memperoleh hak terhadap identitas dan kedudukan hukum. Bekerjasama dengan mitra di dalam dan di luar pemerintah-termasuk para sarjana, pemimpin agama, pejabat pemerintah dan lembaga donor internasional-PEKKA memiliki daya tarik advokasi dalam konteks yang mana kekuatan konservatif yang berkuasa dapat saja menghambat perkembangannya.

2. Memanfaatkan pemberdayaan ekonomi untuk membangun dasar sosial untuk berpendapat secara mandiri dan keikutsertaan sebagai warganegara.

a. PEKKA memusatkan kerjanya pada dukungan pengembangan dari kehidupan ekonomi anggotanya dengan berbasis pada koperasi tabungan. Bagi perempuan yang secara luas diasingkan dari kegiatan ekonomi formal di dalam komunitasnya, hal ini menjadi dasar utama untuk menawarkan baik itu aliran dana maupun komunitas yang didukung kelembagaan. Faktanya, keuntungan ekonomi dari koperasi-koperasi bagi anggotanya menarik perhatian di mana PEKKA secara rutin didekati oleh perempuan yang bukan merupakan kepala keluarga, menanyakan apakah mereka bisa bergabung.

b. Keanggotaan dalam PEKKA mengembangkan pelatihan sistematis dan ruang bagi pengalaman yang memberikan dua perangkat kemampuan kritis lainnya bagi anggota yang mengelola organisasi yang juga memungkinkan pemberdayaan warganegara:

   i. Kolaborasi, negosiasi, resolusi konflik dan penganggaran, seperti yang dipraktikkan di dalam koperasi mereka.

ii. Pengalaman dalam kepemimpinan publik dan proses berwarganegara- mulai dari keterlibatan dalam pemimpin tingkat desa, memberikan bantuan hukum pada pengadilan tingkat provinsi, melakukan lobi pada kementerian nasional.

Kapasitas tersebut tidak hanya menumbuhkan kepercayaan diri dan kemampuan para anggotanya, namun juga membuka untuk berpartisipasi dan pelayanan yang lebih baik bagi perempuan di ruang publik dan sebagai warga negara.

3. Membangun kekuatan penyeimbang melalui tindakan strategis yang memperluas pendapat anggota, kemampuan kepemimpinan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam seluruh aspek kegiatan.

a. Dengan dorongan dari luar, insiatif-inisiatif akuntabilitas sosial yang "diproyeksikan" seringkali berupaya untuk menyuarakan pendapat dan tindakan warga negara tanpa membangun kemandirian dan organisasi yang bertumpu pada anggota. Sebaliknya, pendekatan PEKKA adalah pengorganisasian dan proses pengembangan komunitas jangka panjang, yang dari awal membangun kemampuan, kepercayaan diri, pengetahuan, solidaritas dan kepemimpinan dari anggotanya dengan tujuan mengangkat pendapat dan partisipasi publik mereka. Pendekatan pendidikan populer tentang feminisme menciptakan dukungan, tantangan dan ruang pembelajaran yang menggembirakan yang melekatkan kebijaksanaan dan kekuatan yang diperoleh dari berbagai sumber pengetahuan dan pengalaman perempuan- pemikiran dan dan intelektualitas seperti halnya jiwa dan tubuh. Dalam ruang yang aman tersebut, pemahaman dan pengembangan kekuatan menjadi sangat kritis. Perempuan menguji bagaimana kekuatan tertentu beroperasi untuk membungkam mereka pada satu sisi dan di sisi lain bagaimana mereka mengembangkan bentuk kekuatan personal dan bersama mereka untuk mengubah masyarakat dan hidup mereka. Pada setiap pertemuan, upaya bersama (seperti penelitian partisipatif) dan pelatihan memasukkan unsur dari pengambilan keputusan yang kolaboratif, pengembangan kemampuan dan tindakan yang mengangkat pendapat mereka dan kemampuan untuk terlibat. Struktur PEKKA berjenjang juga membuka peluang perempuan untuk berkembang dalam kepemimpinan dan level keterlibatan dan kekuatannya. Transisi PEKKA untuk menjadi organisasi yang bergantung pada anggota sepenuhnya menciptakan sebuah konteks yang mana berbagai macam kapasitas dan kualitas adalah diperlukan.

b. Fokus PEKKA pada pengorganisasian akar rumput dan penyertaan keterlibatan perempuan dengan pemerintah pada berbagai tingkatan. Menghubungkan koperasi tingkat desa ke dalam jaringan federasi yang beroperasi di tingkat lokal, provinsi dan nasional telah menciptakan sebuah organisasi yang memberikan anggotanya sebuah derajat penghormatan dan perlindungan dalam konteks yang cukup sederhana. Berbasis pada rekam jejak yang panjang dari serikat PEKKA tingkat desa dan advokasi di tingkat kabupaten, saat ini pemimpin terpilih serikat atas nama anggotanya bisa berbicara dengan pengambil keputusan tingkat nasional.

c. Modal dalam pengembangan kepemimpinan membutuhkan infrastruktur organisasi yang mencakup baik itu dukungan staff maupun kapasitas pelatihan, yang dalam kasus PEKKA mencakup Akademi Paradigta. Dengan perangkat dan pengalaman yang diperoleh anggota dari keterlibatannya dengan infrastuktur kewarganegaraan ini, mereka memasuki realitas publik dengan dasar kepercayaan diri dan pengetahuan selain dari apa yang mereka miliki ketika menjalankan usaha ekonomi mereka sendiri.

4. Menunjukkan sejumlah bukti kepada masyarakat umum guna memajukan strategi advokasi dan memaksimalkan dampaknya.

a. Mengingat bahwa salah satu tujuan utama dari PEKKA adalah mengembangkan strategi keterlibatan ekonomi, sosial dan politik bagi anggotanya, dampaknya terjadi di luar target advokasi itu sendiri. Dengan kata lain adalah, dibutuhkan dampak terhadap pemikiran dan pemilihan dari pemimpin di berbagai tingkat, sektor yang berbeda dan perhatian yang berbeda. Masing-masing bukti dan informasi masalahnya berbeda. Data survey yang dikumpulkan secara hati-hati (dan divalidasi secara

akademis) mampu mempengaruhi para teknokrat dan pejabat pengadilan, memiliki cendekiawan Islam, menyebabkan agenda PEKKA lebih bisa meyakinkan otoritas lokal dan pejabat pemerintah setempat. Sementara itu, lembaga donor menginginkan "cerita perubahan" dan bukti dari dampak kehidupan perempuan; program video dan radio tentang kegiatan PEKKA membangun dukungan masyarakat untuk para anggotanya. Pada setiap kasus, PEKKA secara sadar menyesuaikan informasi yang dibutuhkan untuk menjangkau sasaran yang dituju, baik itu untuk melawan bias dan norma yang ada, maupun menawarkan cara baru untuk memahami kebutuhan dan kenyataan anggotanya.

5. Membina mitra dan kerjasama dengan maupun pihak di luar pemerintah di berbagai tingkatan, untuk memperluas dampak dan menangkis perlawanan.

a. Mengingat keanggotaan PEKKA adalah untuk melawan status quo yang mengucilkan perempuan, bahkan ketika melangkah dengan mudah pun, pendekatan keterlibatan kolaboratif dengan mitra dan para pendukung adalah penting untuk memberikan legitimasi dan "melindungi", menghadapi risiko serangan balik. PEKKA membina hubungan dengan para mitra di berbagai sektor sepanjang waktu dan berkelanjutan, dibanding berhubungan dengan para pendukung untuk hanya untuk setiap inisiatif baru. Bermitra dengan Bank Dunia dan lembaga donor internasional, telah membantu memvalidasi model PEKKA dan menarik sumberdaya. Hubungan jangka panjang dengan Kementerian Dalam Negeri membuat PEKKA diminta untuk menggelar konsultasi tentang implementasi Undang-Undang Desa. Selain itu, dalam menghadapi bangkitnya fundamentalisme, berjaringan dengan ulama Islam progresif, ALIMAT, juga menjadi suara penyeimbang untuk mendukung pemberdayaan perempuan.

Peresmian pendirian Serikat Pekka di Sumatera Utara Tahun 2013, yang memperkuat gerakan perempuan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan politik. Sumber: PEKKA

XI. Kesimpulan

PEKKA menggunakan bahasa dan perumpamaan untuk mewujudkan visi dan seluruh tujuannya- menciptakan sebuah struktur sosial yang mendukung dan kuat, ibarat sebuah permadani yang dianyam bersama dengan kreatifitas, solidaritas dan kontribusi perempuan dan para mitranya guna bekerjasama untuk memajukan kepentingan umum dan masa depan yang sehat di bumi. Perumpamaan dan fokus tersebut mendorong sebuah interpretasi yang berbasis nilai yang jernih, interaktif dan menyeluruh dari sejumlah narasi dari "horizontal" dan "vertikal" yang ditemukan pada analisis TPA. Ini seperti tenunan multi warna yang dibuat dari ulas memanjang-perempuan berhimpun bersama dalam koperasi dan jaringan dalam berbagai tingkatan dan yang pada akhirnya menggerakkan dan didorong oleh anggota untuk memperbaiki kehidupan mereka. Mereka membangun hubungan strategis untuk mempengaruhi dan memastikan responsifitas dan akuntabilitas dari hubungan vertikal dari pemerintahan demokratis dan kebijakan publik-bekerja bersama mitra di pemerintah dan di luar pemerintah untuk mempengaruhi keputusan dan mewujudkan akuntabilitas.

Ketika anyaman itu baik, ulas yang berbeda memastikan semangat, memperkaya keragaman dan kehidupan jangka panjang dalam keseluruhan struktur sosial dan masyarakat- Struktur, norma, kerjasama, keyakinan dan sistem kekuasaan yang menghasilkan kebijaksanaan, kesejahteraan, timbal balik dan keadilan.

Dituntun oleh sebuah tujuan transformasi jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat yang lebih egaliter, inklusif dan demokratis, PEKKA memahami bahwa pemerintahan yang akuntabel adalah faktor utama dalam visi mereka dan perwujudannya bergantung pada warga negara yang terhimpun dan aktif. Membangun komitmen kekuataan penyeimbang dan gerakan sosial untuk mendukung pemerintahan yang baik dan akuntabel bergantung pada peranan besar, apakah sebuah kelompok bergerak merespon isu-isu yang mendesak, menempa dan memelihara semangat dan hasrat masyarakat untuk sebuah perubahan yang lebih luas.

Daftar Pustaka

Aceron, Joy, and Francis Isaac. 2016. "Going Vertical: Citizen-Led Reform Campaigns in the Philippines." *Making All Voices Count Research Report*, Institute of Development Studies, Brighton. *Sumber didapatkan pada* 15 Juni 2018 (https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/12718/MAVC_Going_Vertical_FINAL.pdf).

Akhmadi, Asri Yusrina, Sri Budiyati, and Athia Yumna. 2010. "Access to Justice: Empowering Female Heads of Household in Indonesia: Case Studies in Nanggroe Aceh Darussalam, West Java, West Kalimantan, and East Nusa Tenggara." *SMERU Research Report. Sumber didapatkan pada* 28 September 2018 (http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/accesstojustice.pdf).

Antlöv, Hans, Anna Wetterberg, and Leni Dharmawan. 2016. "Village Governance, Community Life and the 2014 Village Law in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 52(2):161–83.

Cornwall, Andrea, and John Gaventa. 2001. "From Users and Choosers to Makers and Shapers: Repositioning Participation in Social Policy." *IDS Working Paper* 127, Institute of Development Studies, Brighton. *Sumber didapatkan pada* 28, 2018 (https://www.ids.ac.uk/publication/from-users-and-choosers-to-makers-and-shapers-repositioning-participation-in-social-policy)

Feruglio, Francesca, Niken Lestari, Emma Bell, and Karen Brock. 2017. "Building Safe Spaces to Support Young Women's Participation in Local Governance in Indonesia." *Making All Voices Count Practice Paper*, Institute of Development Studies, Brighton. *Sumber didapatkan pada* 13 Agustus 2017 (https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/13036/PracPaper_YoungWomenIndonesia_Online.pdf).

Fox, Jonathan. 2015. "Social Accountability: What does the Evidence Really Say?" *World Development* 72:346–61. *Sumber didapatkan pada* 28 September 2018 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15000704).

Halloran, Brendan, and Walter Flores. 2015. "Mobilizing for Accountability: Citizens, Movements and the State." *Transparency and Accountability Initiative Think Piece*, Transparency & Accountability Initiative, Washington, DC. *Sumber didapatkan pada* 30 April 2018 (http://www.transparency-initiative.org/wp-content/uploads/2017/03/movements-and-accountability-final.pdf).

Institute for Development Studies. 2009. "Power Pack: Understanding Power for Social Change." *Sumber didapatkan pada* 31 Agustus 2017 (https://www.powercube.net/wp-content/uploads/2011/04/powerpack-web-version-2011.pdf).

Joshi, Anuradha. 2017. "Legal Empowerment and Social Accountability: Complementary Strategies Toward Rightsbased Development in Health?" *World Development* 99:160–72. *Sumber didapatkan pada* 28 September 2018 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17302425).

Maru, Vivek. 2010. "Allies Unknown: Social Accountability and Legal Empowerment." *Health and Human Rights* 12(1):83–93. *Sumber didapatkan pada* 28 September 2018 (https://www.hhrjournal.org/2013/08/allies-unknown-social-accountability-and-legal-empowerment/).

PEKKA. 2012. "Ten Years of Women-Headed Household Empowerment (PEKKA) December 2001– December 2011." Jakarta: PEKKA. *Sumber didapatkan pada* 30 Agustus 2017 (http://www.pekka.or.id/index.php/en/report/225-ten-years-of-women-headed-household-empowerment-pekka-december-2001-december-2011.html).

PEKKA. 2016. "Annual Report Women Headed Households Empowerment (PEKKA) 2015." Jakarta: PEKKA. *Sumber didapatkan pada* 30 Agustus 2017 (http://www.pekka.or.id/index.php/en/report/332-annual-report-women-headed-household-empowerment-program-2015.html).

PEKKA. 2017. "Final Report Paradigta Academy: Exceptional Women for Village Sovereignty October 2015–March 2017." Jakarta. *Dokumen tidak dipublikasikan*.

PEKKA National Secretariat and SMERU Research Institute. 2014. "Uncovering the Existence and Lives of Women Heads of Household: Report on the Results of Community-Based Welfare Monitoring System." Jakarta. *Dokumen tidak dipublikasikan*.

Sumner, Cate. 2008. "Providing Justice to the Justice Seeker: A Report on the Indonesian Religious Courts Access and Equity Study 2007." AusAID and the Mahkamah Agung. *Sumber didapatkan pada* 2 Oktober 2018 (https://catalogue.nla.gov.au/Record/4499462).

Sumner, Cate. 2010. "Access to Justice: Empowering Female Heads of Household in Indonesia." PEKKA and AusAid. *Sumber didapatkan pada* 30 Agustus 2017 (http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fbd64e65-229d-4c73-8c2c-d446f4fd5d2d/Access_to_Justice_July2010.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-fbd64e65-229d-4c73-8c2c-d446f4fd5d2d-lQMezSH).

Sumner, Cate. 2011. "Increasing Access to Justice for Women, the Poor, and Those Living in Remote Areas: An Indonesian Case Study." *World Bank Justice for the Poor Briefng Note* 6(2). *Sumber didapatkan pada* 15 Juni 2018 (https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/10895).

Sumner, Cate. 2015. "Indonesia's Missing Millions: Erasing Discrimination in Birth Certifcation in Indonesia." *CGD Policy Brief*, Center for Global Development, Washington, DC. *Sumber didapatkan pada* 15 Mei 2018 (https://www.cgdev.org/sites/default/files/CGD-Policy-Paper-64-Sumner-Missing-Millions.pdf).

Sumner, Cate, and Nani Zulminarni. 2017. "Access to Justice and the Right to a Legal Identity for Indonesian Children." Presentation to the World Congress on Family Law and Children's Rights, Dublin, June 7. *Sumber didapatkan pada* 30 Agustus 2017 (http://www.pekka.or.id/documents/Sumner%20Zulminarni%20Paper%20World%20Congress%20v100517%20.pdf).

Sumner, Cate, with Nani Zulminarni. 2018. "The Second Decade—Looking Back, Looking Forward: Women's Access to the Religious Courts of Indonesia." *CILIS Policy Paper*, 16, The University of Melbourne Centre for Indonesian Law, Islam and Society. *Sumber didapatkan pada* 28 September 2018 (https://law.unimelb.edu.au/centres/cilis/research/publications/cilis-policy-papers/the-second-decade-looking-back,-looking-forward-womens-access-to-the-religious-courts-of-indonesia).

VeneKlasen, Lisa, and Valerie Miller. 2002. *A New Weave of Power, People & Politics: The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation*. Rugby: Practical Action Publishing. *Sumber didapatkan pada* 28 September 2018 (https://justassociates.org/en/resources/new-weave-power-people-politics-action-guide-advocacy-and-citizen-participation).

World Bank. 2012. *World Development Report 2012: Gender Equality and Development*. Washington, DC: World Bank.

Zulminarni, Nani. 2014. "Giving Indonesia's Women Head of Households a Fighting Chance." *The Asia Foundation Blog. Sumber didapatkan pada* 30 Agustus 2017 (http://asiafoundation.org/2014/06/18/giving-indonesias-women-head-of-households-a-fighting-chance/).

Zulminarni, Nani, and Valerie Miller. 2015. "From Women's Individual and Collective Power to Political Change—PEKKA: Integrated Approaches to Movement-building and Social Accountability." Presented at the internationalworkshop, "Connecting the Dots for Accountability: Civil Society Policy Monitoring and Advocacy Strategies", June 18–20, 2015, Washington, DC. *Sumber didapatkan pada* 15 Mei 2018 (https://justassociates.org/en/resources/womens-individual-and-collective-power-political-change-pekka-integrated-approaches).

Catatan Akhir

1. PEKKA berafiliasi dengan sebuah jaringan internasional dan berbagi pendekatan, Just Associates (JASS). Lihat di https://justassociates.org/.

2. Lihat di https://namati.org/.

3. Kerja PEKKA didanai oleh hibah berkelanjutan yang sangat fleksibel dan terprediksi dari Japan Social Development Fund (JSDF) dari tahun 2001-2014, yang diberikan oleh Pemerintah Jepang dan diadministrasikan oleh Trust Fund Bank Dunia, dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) memberikan dukungan pada dekade pertama kerja PEKKA. Dukungan dan pendanaan dari berbagai program kemitraan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia seperti Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (AIPJ), Kemitraan Indonesia Australia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU), Kemitraan Indonesia-Australia dalam Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), juga sangat penting dalam memungkinkan PEKKA melakukan kerja-kerjanya.

4. Tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan peraturan yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang menikah secara agama dapat menandatangani surat pernyataan bahwa mereka adalah orangtua dari anak-anaknya dan kartu keluarga membuktikan perkawinan agama tersebut. Namun, banyak pasangan yang menikah secara agama yang memiliki kartu keluarga tetapi tidak bisa membuktikan bahwa mereka menikah secara agama, tidak dapat memperoleh akte kelahiran untuk anak-anak mereka dengan mencantumkan nama ayah dan ibunya. Tidak dicantumkannya nama ayah di dalam akte kelahiran tersebut dapat mengganggu konsekwensi hukum dan sosial di Indonesia secara signifikan.

5. Bagi PEKKA, pesertanya adalah seluruh perempuan yang pernah didampingi dan bertahan aktif di dalam kelompok, walaupun bukan anggota formal dari organisasi akar rumput. PEKKA memberikan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis kemudian kelompok tersebut membentuk serikat. Anggota yang baru kebanyakan tidak siap menjadi anggota serikat. Beberapa di antaranya mengalami trauma akibat pengalaman mereka dengan organisasi yang lain.

6. Hubungan PEKKA dengan *JASS, Institute of Development Studies, The Coady Institute* dan yang lainnya memungkinkan untuk mendalami dan mengadaptasi konsep analisis kekuasaan untuk kerja kepemimpinan dan pengorganisasian mereka.

7. Analisis menyeluruh dari riset arus utama tentang inisiatif akuntabilitas sosial menemukan bahwa banyak intervensi dari luar yang membatasi untuk memberikan informasi pada tingkat lokal dan tidak mendukung pengorganisasian akar rumput. Kebanyakan dari upaya "taktis" ini mengarah pada tidak banyak atau tidak berkembangnya kinerja pada sektor publik. Sebaliknya, inisiatif berjenjang, segala arah dan strategis- seperti pendekatan PEKKA- lebih menjanjikan secara signifikan (*Fox, 2015*). Lihat juga Halloran dan Flores (2015) tentang pendekatan gerakan untuk akuntabilitas dan Aceron dan Isaac (2016) dan Zulminarni dan Miller (2015) tentang kampanye advokasi di berbagai tingkatan.

8. Lebih jauh tentang ALIMAT, lihay http://alimatindonesia.blogspot.com/.

9. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dibuat pada tahun 1984 melalui Keputusan Kementerian Dalam Negeri telah melibatkan sejumlah program kesehatan ibu dan anak. Kebanyakan anggota PKK adalah perempuan menikah dan struktur kepemimpinannya ditentukan oleh posisi suaminya dalam pemerintah desa.

10. Didukung oleh PEKKA dan JASS, perempuan muda telah membentuk kelompok mereka sendiri, FAMM Indonesia, yang mengorganisasi aktivis perempuan muda melalui pendidikan feminis populer, dengan tujuan keberlanjutan dari gerakan perempuan akar rumput berbasis kesetaraan gender dan independen.

11. SMERU Research Institute adalah lembaga riset dan studi kebijakan publik independen, didirikan pada tahun 2001. SMERU adalah lembaga riset terkemuka bidang ketidaksetaraan dan kemiskinan di Indonesia, dengan melakukan metode studi gabungan kualitatif dan kuantitatif. Lihat http://www.smeru.or.id/.

12. Data Terpadu BPS diperbarui untuk kedua kalinya pada tahun 2015 (PPLS) menggunakan survey menyeluruh yang dilakukan melalui proses sensus. Para peneliti BPS mengunjungi dan mengumpulkan data dari 25,7 juta rumah tangga (yang lama sudah tercantum di database dan mengidentifikasi yang baru). Basis Data Terpadu Indonesia (BDT, dikenal dengan Unified Database, UDB) dapat diklasifikasikan sebagai registrasi sosial yang menggabungkan informasi penargetan kemiskinan pada program bantuan sosial di seluruh negeri. Sumber: https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/integrating-data-information-management-social-protection-a1-indonesia.pdf.

13. Lihat Sumner dengan Zulminarni (2018) dan http://www.worldcongress.co/our-partners/pekka/.

14. Untuk beberapa video PEKKA sebelumnya, lihat: http://www.pekka.or.id/index.php/en/component/allvideoshare/video/latest/strugling-with-shadows-weaving-a-future.html and http://www.pekka.or.id/index.php/en/component/allvideoshare/video/latest/surviving-amidst-the-storm-bertahan-di-tengah-badai.html.

LAMPIRAN 1: Memahami Dinamika Kekuasaan Sehingga Kita Bisa Melawan dan Mengubahnya

PEKKA menggambarkan tentang kerangka kerja analisis kekuasaan yang digunakan secara luas dan yang juga dikembangkan dan diadaptasi oleh JASS bersama dengan Intitute of Development Studies (IDS) (*Veneklasen dan Miller 2002; IDS, 2009*).

Strategi pendidikan dan pengorganisasian PEKKA berfokus pada pengembangan bentuk kekuasaan transformatif yang membebaskan dan meningkatkan taraf hidup- dan ketika dimanfaatkan secara bersama akan menjadi kekuatan bagi perubahan sosial. Menggambarkan tentang praktik dan berpikir feminis, PEKKA telah membuat pengembangan kekuatan personal- kepercayaan diri, menghargai diri sendiri atau kekuatan dari dalam- sebuah bagian proses yang tidak terpisahkan yang secara terus menerus mendukung perempuan dalam membangun kekuatan dengan yang lain: itulah kekuatan bersama mereka. Bentuk kekuatan ini bertemu dan saling memperkuat antara satu dengan yang lain, sehingga perempuan menemukan kekuatan untuk bertindak dan mengubah kehidupan mereka menuju kenyataan yang berbeda- dari yang lebih personal dan pribadi menuju yang lebih umum dan formal.

Dasar kekuatan bersama dan personal ini memungkinkan perempuan untuk melakukan perubahan pada masyarakat dan komunitas mereka yang menantang dan terkadang sangat berisiko. Namun, bahkan dengan fondasi yang kuat pun, perempuan seringkali menghadapi bentuk kekuatan yang tetap membuat mereka tersubordinasi dan diam, yang pada saat yang sama melindungi kepentingan elit dan pejabat berwenang. Dalam analisis feminis, jenis kekuataan ini sering disebut dengan "berkuasa"- kekuatan dari yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Ia hadir dalam berbagai bentuk: kekuatan dari kekerasan dan ketakutan, manipulasi dan demonisasi, memaksakan norma dan ideologi, hak-hak istimewa, pengaruh uang dalam politik dan pengambilan kebijakan. Seluruh sarana dan dinamikanya dieksploitasi oleh kepentingan kekuasaan, termasuk kekuatan anti demokrasi, mengontrol kebijakan dan sumberdaya dan mempertahankan status quo.

Dalam memetakan cara yang "berkuasa" mengurangi suara perempuan dan membatasi keterlibatan publik mereka, PEKKA telah mengembangkan kerangka kerja (*Lampiran 2*) yang membantu untuk memahami dinamika interaktifnya: kekuatan yang menghasilkan dan memperkuat marjinalisasi dan subordinasi perempuan.

Kekuatan formal dan terlihat: merujuk pada proses dan struktur formal dari pemerintahan dan pengambilan keputusan- termasuk pengadilan, hukum, kebijakan, anggaran dan peraturan. Cara bagaimana kebijakan dan hukum formal pemerintah telah gagal untuk mengakui dan memberikan layanan kepada perempuan kepala keluarga sebagai contohnya. Yang lainnya adalah kurangnya hak atau penegakan hak perempuan dalam sistem pengadilan.

Kekuatan bayangan: Merujuk pada sejumlah kelompok kepentingan non-negara yang kuat seperti korporasi, entitas keagamaan atau kartel obat-obatan terlarang yang beroperasi di belakang layar untuk mempengaruhi dan mengontrol agenda publik. Mereka menggunakan berbagai taktik termasuk penyuapan dan bentuk korupsi lainnya, memanipulasi dan mengontrol media dan mengancam dan melakukan kekerasan. Sebagai contoh, pemimpin agama, pemimpin lokal dan rentenir yang berusaha untuk mengganggu PEKKA untuk mencegah anggotanya membangun pengaruh politik atau melangsungkan akuntabilitas pemerintah.

Kekuatan tak terlihat: Merujuk pada sistem keyakinan, ideologi dan norma yang membentuk pandangan masyarakat terhadap dunia dan tempat tinggal mereka. Didukung dan diperkuat oleh kelompok kepentingan yang kuat, ide ini menginternalisasi dan terkadang terlihat alami, tidak untuk dipertanyakan- sebagai contoh keyakinan tentang partiarki dan fundalimentalisme yang mengesahkan keistimewaan dan kekuatan dari laki-laki dan merendahkan perempuan: keyakinan yang sama yang melegitimasi eksklusi sosial terhadap para janda.

LAMPIRAN 2: Kerangka Kerja PEKKA

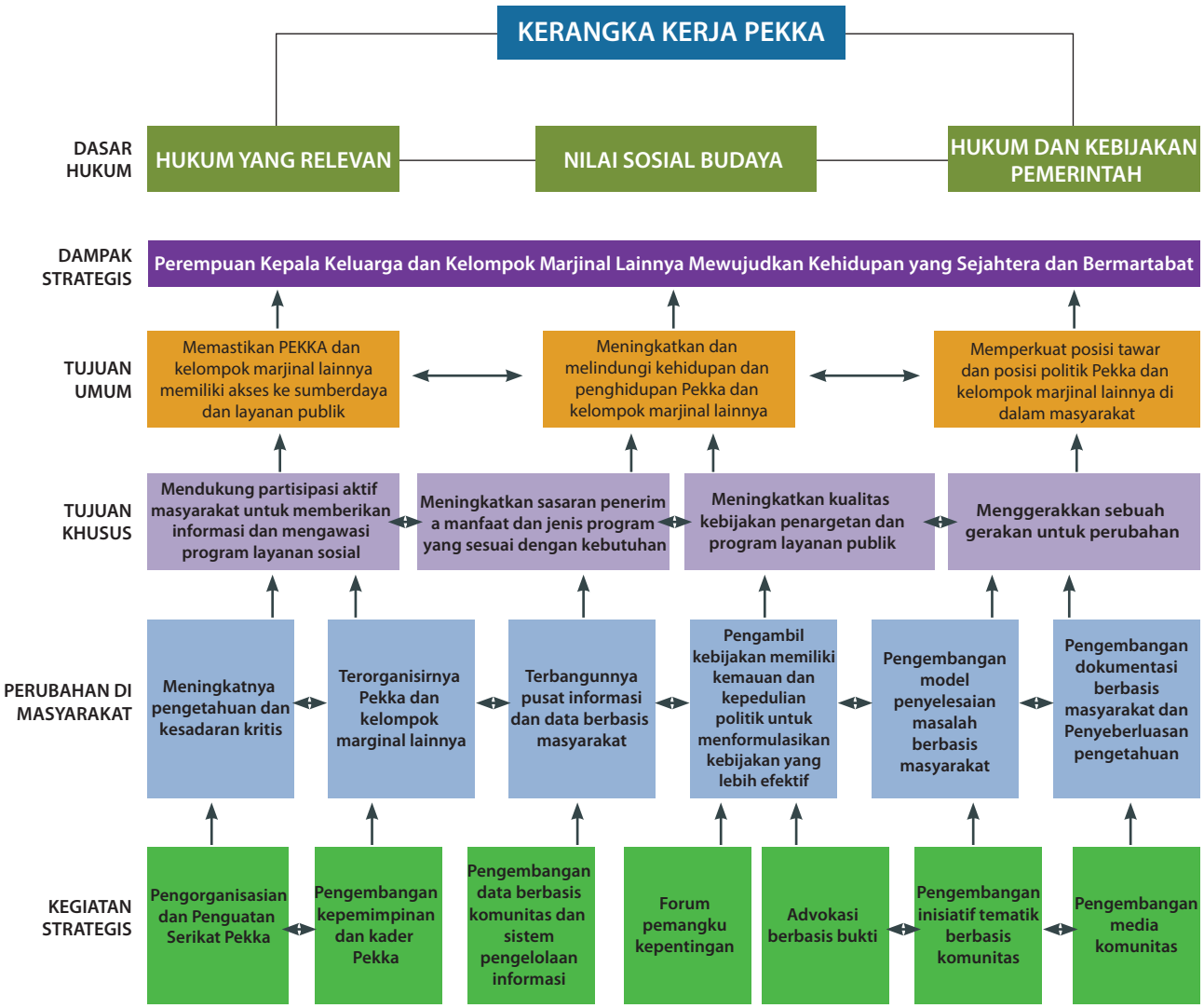

Sumber: PEKKA

Publikasi Acountability Research Center

Catatan Akuntalibitas

- Rachel Sullivan Robinson. 2019. "Setting the Stage for Increased Accountability: The White Ribbon Alliance Nigeria Campaign to Improve Maternal, Newborn, and Child Health in Niger State." *Accountability Note* 6.
- Carlos García Jiménez. 2019. "Citizen Experiences and Challenges in Bringing Transparency and Accountability to Local Governments in Southern Mexico." *Accountability Note* 5.
- Carlos García Jiménez. 2019. "Experiencias y desafíos ciudadanos para instituir la transparencia y la rendición de cuentas en gobiernos locales del sur de México." *Accountability Note* 5.
- समीर गर्ग और शुची पांडे. 2018. स्थाई बदलाव के लिए सीखने की रणनीति की भूमिका: भारत में मितानिन सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्तायों द्वारा सावर्जनिक उत्तरदायित्व को बढाने पर कार्य. *Accountability Note* ४.
- Samir Garg and Suchi Pande. 2018. "Learning to Sustain Change: Mitanin Community Health Workers Promote Public Accountability in India." *Accountability Note* 4.
- Elana Berger. 2018. "How a Community-Led Response to Sexual Exploitation in Uganda Led to Systemic World Bank Reform." *Accountability Note* 3.
- Walter Flores. 2018. "How Can Evidence Bolster Citizen Action? Learning and Adapting for Accountable Public Health in Guatemala." *Accountability Note* 2.
- Walter Flores. 2018. "Lecciones sobre acción ciudadana y rendición de cuentas en los servicios públicos de salud de Guatemala." *Accountability Note* 2.
- Abdulkarim Mohammed. 2017. "Following the Money in Ghana: From the Grassroots to the Hallways of the IMF." *Accountability Note* 1.

Laporan Pertukaran Belajar

- Brenda Rodriguez Herrera, Rebeca Salazar Ramírez, and Mariana González Moyo. 2018. "First Meeting of Auxiliary Watershed organizations: Good Practices, Limitations, Lessons, and Prospects. Rapporteur's Report." *Learning Exchange Report* 4.
- Marta Schaaf, Caitlin Warthin, Amy Manning, and Stephanie Topp. 2018. "Report on the Think-in on Community Health Worker Voice, Power, and Citizens' Right to Health." *Learning Exchange Report* 3.
- Joy Aceron, Angela Bailey, Shaazka Beyerle and Jonathan Fox. 2017. "Citizen Action Against Corruption." *Learning Exchange Report* 2.
- Victoria Boydell, Jonathan Fox and Sarah Shaw. 2017. "Transparency and Accountability Strategies & Reproductive Health Delivery Systems." *Learning Exchange Report* 1.

Kertas Kerja

- Joy Aceron. 2019. "Pitfalls of Aiming to Empower the Bottom from the Center: The Case of Philippine Participatory Budgeting." *Accountability Working Paper* 4.
- Nani Zulminarni, Valerie Miller, Alexa Bradley, Angela Bailey, Jonathan Fox. 2018. "Movement-building for Accountability: Learning from Indonesian Women's Organizing." *Accountability Working Paper* 3.
- Francis Isaac, Danilo Carranza and Joy Aceron. 2017. "From the Ground Up: Multi-Level Accountability Politics in Land Reform in the Philippines." *Accountability Working Paper* 2.
- Suchi Pande and Rakesh R. Dubbudu. 2017. "Citizen Oversight and India's Right to Work Program: What do the Social Auditors Say?" *Accountability Working Paper* 1.

Buku

- Joy Aceron (Ed.). 2018. *Going Vertical: Citizen-led Reform Campaigns in the Philippines (Second Edition)*. Quezon City and Washington DC: Government Watch (G-Watch) and Accountability Research Center (ARC).

Lihat seluruh publikasi pada http://accountabilityresearch.org/publications/

ACCOUNTABILITY RESEARCH CENTER

American University
School of International Service
4400 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20016
www.accountabilityresearch.org